

**DEMOKRASI ALA SOEKARNO
(DEMOKRASI TERPIMPIN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana
dalam Ilmu Ushuluddin



OLEH :

HAMDAN HAMID
10731000028

**PROGRAM S1
JURUSAN AKIDAH FILSAFAT**

**JURUSAN AKIDAH FILSAFAT
FAKUTAS USHULUDDIN
UIN SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2012**

ABSTRAK

Dari serentetan nama-nama tokoh revolusioner yang pernah mengukir sejarah indah bangsa Indonesia, sepertinya nama Soekarno yang paling banyak diperbincangkan, baik dikalangan sejarawan, politikus maupun dikalangan pemikir. Hal itu terbukti dari hasil pikiran dan ide-ide cemerlang yang beliau kemukakan selalu menjadi panutan walaupun kadang menimbulkan perdebatan. Adapun diantara pemikiran Soekarno yang paling menarik adalah konsep demokrasi terpimpin. Gagasan ini merupakan bentuk dari sistem ketatanegaraan yang diterapkan Soekarno dalam membangun Indonesia ke arah yang lebih maju dibandingkan ketika masa demokrasi parlementer.

Terjadinya peralihan sistem ketatanegaraan dari demokrasi parlementer ke demokrasi terpimpin menjadi catatan penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia umumnya dan penulis khususnya. Walaupun peralihan sistem tersebut selalu menuai pro dan kontra dalam penerimaan maupun penerapannya, namun ada beberapa persoalan pokok yang perlu kita pahami sekaligus dalam terkait dengan sistem demokrasi ala Soekarno tersebut, yaitu bagaimana sesungguhnya konsep demokrasi yang pernah diterapkan Soekarno dan apa yang menjadi landasan beliau dalam menerapkannya. Hal inilah yang menjadi fokus utama penulis dalam meneliti penerapan sistem demokrasi terpimpin dalam perspektif Soekarno.

Soekarno yang dianggap sebagai penentu utama atas kebijakan-kabijakan yang berlaku dalam periode demokrasi terpimpin, selalu berupaya menciptakan keadilan dan kemakmuran dalam segala bidang baik politik, sosial maupun ekonomi. Hal ini bertujuan untuk terbangunnya sebuah sistem demokrasi yang betul-betul bisa memimpin sekaligus membimbing. Karena kemajuan suatu bangsa tidak akan bisa dicapai kalau antara rakyat dengan pemimpin tidak saling bahu membahu dalam mencapai tujuan yang ingin diraih. Di sinilah perlu adanya sikap gotong royong sebagai cerminan kebersamaan dan kesetaraan antara pemimpin dengan rakyat.

Bagi Soekarno, demokrasi terpimpin dipandang sebagai suatu solusi dari persoalan politik yang terjadi ketika itu. Maka dari demokrasi terpimpinlah yang harus diterapkan sebagai suatu sistem pemerintahan yang bisa menstabilisasi kemelut politik bangsa Indonesia saat itu.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji penulis haturkan kehadiran Allah SWT. Limpahan nikmat dan karunia Allah yang hingga detik ini masih penulis rasakan. Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang yang telah memberi kekuatan lahir dan batin kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Demokrasi Ala Soekarno (Demokrasi Terpimpin)”. Semoga penelitian ini mampu menjadi bukti atas rasa syukur penulis terhadap ilmu yang dianugerahkan Allah SWT. Amin.

Shalawat kepada Rasulullah SAW. Khatamun Nabiyyin. Suri teladan terbaik sepanjang zaman. Sang *al-Amin* yang telah mengajarkan sebuah nilai kejujuran, semoga rasa rindu padanya semakin tumbuh dalam hati ini.

Terima kasih setulus hati penulis ucapkan kepada;

1. Kedua orang tua tercinta ayahanda, Hamidi. Semoga tetesan keringatmu dalam membesarkan ananda menjadi amal kebaikan disisi Allah SWT. Belum sempat ananda berbakti menjadi anak terbaikmu ayah. Buat ibunda Nurhayati, sampai hari ini do'a ibu menjadi perisai ananda dalam menapaki jalan berkerikil ini. Nasehat ibu juga selalu mengingatkan ananda jika tersilap dari niat semula. Sampai skripsi ini ananda selesaikan ibu selalu menjadi penerang ketika semangat menjadi kelam. Ayah-ibu semoga ananda menjadi anak yang shaleh yang selalu mendo'akanmu. Amin. Kepada keluarga besar penulis, abang, kakak, adik, dan ipar. Bermula dari keluargalah penulis belajar disiplin, memperjuangkan hidup dan masa depan. Perhatian kalian memberikan arti dan semangat baru dalam perjalanan hidupku.

2. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Prof. H.M Nazir.
3. Ibunda Dekan Fakultas Ushuluddin, Dr. Salmaini Yeli, M.Ag dan para Pembantu Dekan I, II, dan III, atas segala kemudahan yang diberikan.
4. Ketua Jurusan Akidah Filsafat, dan Bapak Tarpin, M.Ag beserta semua staf di jurusan Akidah Filsafat yang telah memberikan nasehat yang berharga serta kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan dan penulisan ini.
5. Bapak Prof.Dr. Afrizal, M.A dan Bapak Irwandra, M.A selaku pembimbing selama penulisan skripsi ini, yang telah banyak membantu dalam membimbing penulis hingga berhasil menyelesaikan penulisan tugas akhir ini. Masukan-masukan Bapak akan menjadi ilmu yang berharga bagi penulis.
6. Untuk semua dosen Fakultas Ushuluddin. Terkhusus dosen-dosen tercinta di Akidah Filsafat yang telah mendidik dengan sepenuh hati. *Jazakumullahu khairan katsiran.*
7. Seluruh pegawai dan karyawan di lembaga tercinta Fakultas Ushuluddin, Kabag TU beserta jajarannya yang telah membantu dalam administrasi selama menimba ilmu hingga penyelesaian tulisan ini.
8. Kemudian rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Ushuluddin terkhusus rekanan di jurusan Akidah Filsafat 2007, Hendri, Zulheri, Aditya Andria, M. Ainul Ashuri, Reki Hepana, S.Ud, Firdaus, S.Ud, Nur Asiah, Dewi Sartika, S.Ud Rima Yani, S.Ud, Nurfitriyanti, Ema Diana, Nurhayati. Permintaan maaf, jika selama bergaul banyak salah yang menggores hati. Terima kasih kalian telah memberi warna

hidupku dalam lingkungan ilmu ini. Semoga semua mimpi-mimpi kita dapat terwujud. Jangan takut dengan batu besar tapi waspadalah pada kerikil kecil.

9. Kawan-kawan di PW HIMA/HIMI PERSIS Riau, thanks all. Semoga kita menjadi kader-kader yang hidup dalam sebuah impian. Di organisasi ini, kalian telah mengajarkan penulis akan arti sebuah perjuangan. Perjuangan untuk masa depan dan perjuangan untuk menggapai setiap impian.

Dan kepada semua kawan-kawan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam lembaran sempit ini. Kalian telah berjasa dalam hidupku, mengajarku bagaimana berani bermimpi, bagaimana harus kuat dan bagaimana percaya diri. Hanya Allah-lah yang akan membalas semua kebaikan kalian. Amin.

Pekanbaru, 31 Januari 2012

Penulis

HAMDAN HAMID
NIM:10731000028

DAFTAR ISI

Nota Dinas	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	v
Abstrak.....	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah	9
C. Rumusan Dan Batasan Masalah	9
D. Alasan Pemilihan Judul	10
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian	12
G. Tinjauan Pustaka	12
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Penulisan	18

BAB II BIOGRAFI SOEKARNO

A. Kehidupan Awal Soekarno	19
B. Masa Pendidikan Soekarno	22
C. Karya-Karya Soekarno	24
D. Aktivitas Politik Soekarno	26
E. Corak Pemikiran Soekarno	28

BAB III PEMBAHASAN

A. Masa Pra-Demokrasi Terpimpin (1945-1959)	31
1. Sejarah Lahirnya Demokrasi Terpimpin	31
2. Faktor-Faktor Yang Melatar Belakang Lahirnya Demokrasi Terpimpin	37
3. Asas Yang Melahirkan Demokrasi Terpimpin	39
4. Defenisi Demokrasi Terpimpin	42
B. Masa Perkembangan Demokrasi Terpimpin (1959-1965)	45
1. Awal Diterapkan Demokrasi Terpimpin	45

2. Pedoman Dalam Penerapan Demokrasi Terpimpin ...	46
3. Pro-Kontra Demokrasi Terpimpin	48
4. Perkembangan Hukum Dalam Demokrasi Terpimpin ...	49
C. Perkembangan Politik Dimasa Demokrasi Terpimpin	51
1. Penyaluran Tuntutan (Aspirasi Rakyat)	51
2. Munculnya Gagasan Nasakom	53
D. Masa Akhir Demokrasi Terpimpin (1966-1967)	54
1. Munculnya G30-S-PKI	54
2. Terbitnya Surat Perintah 11 Maret 1966	56
BAB IV ANALISIS DATA	59
1. Kedudukan Islam di Era Demokrasi Terpimpin	59
2. Berlakunya Kembali UUD 1945	64
BAB V PENUTUP	
1. Kesimpulan	66
2. Saran	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Dekrit Presiden Tanggal 5 Juli 1959	68
2. Undang-Undang Dasar 1945	70
3. Undang-Undang Dasar Sementara 1950	80

ABSTRAK

Demokrasi Terpimpin diawali sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang ditandai oleh kekuasaan Soekarno yang hampir tidak terbatas dan pemusatan kekuasaan berada di tangan Presiden Soekarno. Era Demokrasi Terpimpin ditandai dengan hadirnya Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai partai politik yang paling dominan dan TNI AD sebagai kekuatan Hankam dan sosial politik. Demokrasi Terpimpin merupakan penyeimbangan kekuasaan antara kekuatan politik militer Angkatan Darat dan Partai Komunis Indonesia dan Presiden Soekarno sebagai balancer diantara keduanya.

Pertentangan antara Presiden Soekarno, Tentara AD dan partai-partai politik dalam konteks Demokrasi Terpimpin menjadi kajian penting dalam melihat kekuasaan Presiden dalam kurun waktu berlakunya UUD 1945 di Indonesia. Pada era pemerintahan sistem politik Demokrasi Terpimpin ini, peranan PKI sangat menonjol dan berkembang menjadi kekuatan politik. Sementara pihak yang gigih melawan PKI adalah Partai Masyumi dan PSI yang pada akhirnya dibubarkan oleh Presiden Soekarno karena dianggap menjadi pendukung pemberontakan yang terjadi di daerah Sumatera dan Sulawesi. TNI AD juga turut menjadi pihak yang anti komunis. Presiden Soekarno bekerjasama dengan TNI AD untuk mengendalikan partai politik, namun di sisi lain Soekarno melindungi PKI. Soekarno membutuhkan PKI karena merasa terancam akan kemungkinan pengambil-alihan kekuasaan oleh Angkatan Darat, maka terjadilah persaingan antara tiga kekuatan, yaitu Presiden, TNI AD dan PKI. Otoritas dan kedudukan Soekarno sebagai penentu kebijakan-kebijakan politik menjadikannya sebagai ajang perebutan dua kekuatan politik antara TNI dan PKI untuk saling mendekati dan mempengaruhi Presiden.

Presiden Soekarno mengatur keseimbangan kekuatan politik antara TNI dan PKI dan berusaha tetap mengontrolnya agar salah satunya tidak lebih dominan dari Presiden, sedangkan Presiden tetap menjadi faktor penentu (dominan). Tentara sangat mewaspadaai kedekatan Soekarno dengan PKI yang digunakan PKI sebagai sarana pendukung demi gagasan Nasakomisasi system Demokrasi Terpimpin. Namun sebaliknya PKI senantiasa memanfaatkan proyek nasakomisasi untuk masuk kedalam pemerintahan dan lembaga nonstructural yang dianggap penting sekali.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah

Perkembangan pemikiran yang terjadi di Eropa dan Amerika, akhirnya melahirkan paham-paham baru yang berkembang di wilayah tersebut. Paham-paham baru itu kemudian menyebar ke seluruh dunia, sehingga bangsa-bangsa yang ada di Asia dan Afrika termasuk di Indonesia juga tidak luput dari pengaruh paham-paham tersebut, diantaranya adalah paham demokrasi.¹

Masuknya paham demokrasi² ke daratan Indonesia telah memberikan corak baru dalam perkembangan pemikiran rakyat ketika itu. Walaupun pada awal masuknya paham demokrasi banyak menuai pro dan kontra karena dianggap tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang mayoritas Muslim, namun tidak bisa dipungkiri bahwa demokrasi mempunyai pengaruh yang besar terhadap lahirnya semangat nasionalis³ dalam jiwa raga pergerakan pembaharuan di nusantara. Sebagai bangsa yang terjajah ketika itu, semangat

¹ Sartono, dkk, *Sejarah Nasional Dan Umum*, Surakarta : Pt. Pabelan, 1996, hlm. 39-40

² Demokrasi adalah ide politis atau filosofis tentang kedaulatan rakyat, ini berarti semua kekuasaan politik dikembalikan pada rakyat itu sendiri sebagai subyek asali otoritas ini. Yang ditambahkan disini ialah persyaratan agar semua warga Negara mampu menggunakan rasionya dan mempunyai suara hati. Hendaknya mereka sendiri sebagai manusia yang bebas dan pada dasarnya sama berperan serta dalam mengambil keputusan tentang masalah-masalah politik yang menjadi perhatian mereka. Bagaimanapun, rakyat secara keseluruhan dapat menjalankan kekuasaan tertinggi Negara secara bersama hanya pada satu tingkat yang sangat terbatas. Karena itu proses hukum harus dituangkan dalam UUD. Proses-proses semacam ini memungkinkan rakyat mengambil bagian secara tidak langsung dalam pembentukan kebijakan politik dengan pemilihan secara bebas dan rahasia wakil-wakil rakyat yang menduduki jabatan dalam jangka waktu tertentu. Wakil-wakil ini dipilih menurut prinsip yang ditentukan oleh mayoritas tertentu dan mereka diberikan hak dan kewajiban yang digariskan secara jelas. Lihat: Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000, cet ke 2 hlm. 154-155

³ Nasionalisme adalah semangat kebangsaan, perasaan kebangsaan atau semangat cinta terhadap bangsa dan tanah air. *op.cit* hlm. 39

kebangsaan mampu mempersatukan tekad para pejuang untuk meraih kemerdekaan. Hal itu terbukti dengan adanya semangat kepahlawanan dan sikap rela berkorban yang tulus dalam diri para pejuang, hingga akhirnya Indonesiapun bisa melepaskan diri dari belenggu penjajahan bangsa Eropa. Walaupun demikian, paham demokrasi tersebut terus tumbuh dan berkembang di negara ini sampai sekarang.⁴ Kalau kita perhatikan di Indonesia khususnya dan dunia umumnya, hampir seluruh negara-negara di dunia menjadikan paham demokrasi sebagai asas fundamental dalam system kenegaraan (pemerintahan).⁵

Hal itu terbukti dengan adanya paham demokrasi yang dianut Indonesia, baik dengan system parlementer⁶ maupun dengan system presidensill. Pada masa awal perkembangan paham demokrasi di Indonesia, ia mampu memberikan pengaruh yang positif dalam perkembangan pemikiran dan cara pandang bangsa ini. Karena pada prinsipnya, paham demokrasi mempunyai tujuan yang luhur dalam mengangkat harkat, martabat serta kebebasan rakyat dari segala bentuk ketertindasan dan keterjajahan. Maka dalam hal ini, rakyat mempunyai peranan penting dalam mengontrol dan mengawasi jalannya pemerintahan melalui perwakilannya yang duduk di Dewan Perwakilan

⁴ *Ibid* hlm. 41

⁵ Moh. Mahfud MD, *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia*, Jakarta : Pt. Rineka Cipta, 2003, hlm. 18

⁶ Parlementer adalah suatu model demokrasi yang ditandai oleh adanya konsentrasi kekuasaan ditangan parlemen. Karena parlementer terdiri dari anggota yang banyak dan beragam. Maka biasanya akan menyebabkan lemahnya pemerintahan. Pemerintahan harus disusun parlemen yang heterogen keanggotaannya, sehingga akan sulit bisa terwujud dengan segera. Kabinet koalisi yang lemah biasanya dibentuk melalui jalan tawar menawar. Kelemahan bentuk demokrasi ini ialah sering terjadi diskontinuitas dan anarkis. Lihat: Cheppy Hari Cahyono & Suparlan Alhakim, *Ensiklopedi Politika*, Surabaya: Usaha Nasional, 1982, hlm. 88

Rakyat. Dengan demikian, maka terciptalah tatanan ketertiban, keadilan, kebebasan, taat aturan dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.⁷

Akan tetapi, akibat perkembangan pemikiran dan ilmu pengetahuan, akhirnya pemahaman orang terhadap arti demokrasi menjadi luas dan hampir tak bertepi. Dalam kondisi seperti ini, demokrasi sering kali disalah artikan dari makna dasar yang telah ditetapkan. Akibatnya, pengaruh dari paham demokrasi berujung dengan hancurnya dunia perpolitikan. Kehancuran yang ditimbulkan membuat system pemerintahan ini seperti gelanggang perebutan kekuasaan. Kekuasaan seolah-olah menjadi tujuan untuk menggapai keinginan, sehingga kekuasaan seringkali mengesampingkan kepentingan orang-orang yang tidak berdaya.

Salah satu dampak dari lemahnya penerapan demokrasi yang bisa kita lihat adalah tersedianya ruang kebebasan yang kian terasa cenderung tak bertepi. Setiap suara, keinginan dan kepentingan memiliki hak yang sama untuk diaktualisasikan berbagai kalangan. Namun suara itu akan menjadi riuh, keinginan akan menjadi gaduh, bahkan kepentingan akan berbuah rusuh, ketika upaya mewujudkannya dilakukan tanpa aturan. Inilah yang kita saksikan belakangan ini terkait dengan aktualisasi kepentingan elite politik dan menguatnya aspirasi masyarakat yang cenderung tak terkendali. Politik menjadi pintu masuk pemuas hasrat dalam meraih kekuasaan dengan menghalalkan segala cara. Akibatnya demokrasi mengalami “*deviasi*”⁸ karena

A. Ubaedillah, Abdul Rozak, dkk, *Demokrasi, Hak Azazi Manusia Dan Masyarakat Madani*, Jakarta : ICCE UIN SYAHID, 2006, hlm. 130

⁸ Deviasi asal kata deviate, yang artinya menyimpang, berselisih, berbeda. Lihat: Andrea Halim, *Kamus Lengkap 10 Miliar Inggris-Indonesia*, Surabaya : Sulita Jaya, hlm. 98

tindakan dan aksi atas nama demokrasi tidak jarang berujung anarkis. Ini semua merupakan muara dari perilaku politik yang mengalir melampaui mekanisme dan system yang tertuang dalam konstitusi dan tata tertib hukum.

Kalau merujuk pada system pemerintahan sebagaimana tercantum dalam konstitusi terbaca jelas bahwa, Indonesia sebagai sebuah negara yang menganut sistem demokrasi presidentsill. Namun dalam prakteknya sistem tersebut tampak berada di bawah kungkungan parlementerian. Bahkan tidak jarang otoritas kekuasaan yang dimainkan anggota parlemen cenderung menghegemoni seluruh ranah eksekutif yang secara struktural berdasarkan prinsip *separation of power* memiliki kedudukan yang sama, yaitu sebagai lembaga tinggi negara. Akibat distorsi ini, tidak jarang anggota parlemen terjebak dalam jaring-jaring korupsi dan kolusi. Kenyataan tersebut jelas merupakan kejangalan dari fungsi dan tugas anggota parlemen sebagai pilar penting dalam penegakan demokrasi.⁹

Itulah sebabnya proses politik dalam system demokrasi tidak hanya mengharuskan adanya aturan sebagai rujukan kolektif, tapi juga ketundukan untuk mematuhi. Aturan seharusnya bukan saja sekedar rangkaian prosedur, melainkan norma atau nilai yang distrukturkan. Aturan merupakan kristalisasi dari nilai-nilai dan logika yang berkembang dalam masyarakat yang diformulasikan dalam bentuk prosedur-prosedur. Karena itu seharusnya aturan berjaln kelindan dengan kepatuhan warga negara untuk menjalankannya dan respek terhadap tatanan hukum. Ketika aturan hanya

⁹ A. Bakir Ihsan, *Etika Dan Logika Berpolitik, Wacana Kritis Atas Etika Politik, Kekuasaan Dan Demokrasi*, Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2009, hlm. iv

menjadi rangkaian prosedur yang tidak dihormati oleh sikap dan perilaku warga negara khususnya elite politik, maka dapat dipastikan munculnya berbagai problem yang dampaknya tidak saja pada impotensi aturan, tapi terhambat jalannya demokrasi.

Secara ideologis, Indonesia memiliki landasan hukum yang cukup kuat bagi terbangunnya demokrasi politik. Sebagai rujukan nilai, ideologi Pancasila merupakan landasan yang paling cocok untuk di terapkan di Indonesia dibandingkan dengan sekian ragam ideologi yang mendunia. Namun sayangnya landasan tersebut sempat tertekan oleh kekuasaan pada masa rezim orde baru sehingga ia menjelma menjadi seperangkat nilai yang terpinggirkan dari kesadaran warga negara. Fenomena seperti ini bisa terjadi juga pada saat ini, ketika peraturan bahkan undang-undang dibiarkan tidak lebih sebagai kumpulan tata hukum dan prosedur tanpa manifestasi dalam kultur. Karena itu persoalan aktualisasi dan pengejawantahan konstitusi menjadi penting agar proses politik tidak hanya melahirkan tata hukum dan prosedur yang justru membelenggu disatu pihak dan ternodai dipihak lain. Inilah “*anomaly*”¹⁰ etika politik dalam masyarakat yang masih bergulat dalam transisi.¹¹ Dalam hal ini, Indonesia masih dikatakan gagal dalam memahami dan mempraktekkan jalannya system demokrasi. Itu disebabkan oleh kegagalan elit politik dalam menjalankan system demokrasi tersebut. Kebanyakan mereka malah

¹⁰ Anomaly artinya kelalaian, keganjilan, keanehan. *Ibid* hlm. 21

¹¹ A. Bakir Ihsan, *op.cit* hlm. v

menyalahgunakan dan memanipulasi nilai-nilai demokrasi demi kepentingan politik jangka pendek.¹²

Tampaknya persoalan tentang demokrasi yang dihadapi makin hari makin komplis. Tantangan dan rintangan yang dijalani pun semakin besar. Maka dari itu, sudah menjadi kewajiban semua orang sebagai warga negara yang menganut paham demokrasi untuk mengetahui makna maupun pengertian yang terkait dengan istilah demokrasi, baik makna yang diberikan oleh orang yang melahirkan istilah demokrasi atau makna lain yang diberikan kepadanya, maupun makna yang digunakan manusia untuk memahaminya.¹³

Walaupun demikian, demokrasi selalu menjunjung tinggi hak kebebasan, namun kebebasan yang ditawarkan demokrasi mensyaratkan adanya sikap kesantunan. Santun dalam berekspresi dan santun dalam berkompetisi dan berkontestasi. Indikator kesantunan adalah kesediaan untuk mematuhi aturan demi kepentingan publik. Inilah salah satu agenda yang belum tercermin secara utuh dalam ranah kehidupan perpolitikan di negara ini. Persaingan antar elite politik sering berakhir dengan kehampaan tegur sapa sebagai ekspresi ketidaksiapan mengakui kemenangan lawan dan menerima kekalahan diri. Kesantunan berpolitik mengajarkan untuk bersikap objektif terhadap siapapun dengan segala kekurangan dan kelebihanannya. Tampaknya fenomena ini belum sepenuhnya hadir di republik ini. Bahkan secara historis peralihan

¹² Masdar Hilmy, *Islam dan Tantangan Demokratisasi di Indonesia*, Lihat: Titik-Temu, Jurnal Dialog Peradaban, Volume 1, No 2, Januari-Juni 2009, hlm. 96

¹³ Nella Lucky, *Tela'ah Kritis Taqiyuddin An-Nabhani Terhadap Demokrasi*, Skripsi Program Sarjana Strata 1 Jurusan Aqidah Filsafat Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA Riau, 2010, hlm. 3

yang berlangsung sejak orde lama tak pernah mengalir secara berkesenambungan.¹⁴

Maka dalam hal ini, Indonesia tidak bisa melupakan peran penting Soekarno dalam membangun dan menerapkan system demokrasi terpimpin. Karena dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, Soekarno adalah figur terpenting dalam memegang tonggak perjuangan bangsa Indonesia. Dia adalah peletak dasar kemerdekaan dan pencetus Pancasila, sang proklamator kemerdekaan, serta seorang ideolog yang handal. Pidato-pidatonya mampu menggugah dan menggerakkan massa untuk mengikuti kebijakan yang harus ditempuhnya.

Sejak ia masih muda, Soekarno sudah berkenalan dengan banyak budaya dan ideologi, tentu saja perjalanan hidupnya itu sangat mempengaruhi pemikiran ideologisnya. Kematangannya dalam berpikir sudah menjadi buah bibir setiap orang dan tidak perlu diragukan lagi. Setiap ide-ide yang beliau sodorkan menjadi semangat baru bagi bangsa ini.

Pribadi kharismatik yang melekat dalam diri Soekarno menjadi cerminan bagi bangsa ini, bahwa telah lahirnya seorang pemimpin idaman yang bisa memberikan penyinaran di saat berjuta-juta rakyat hidup dalam kegelapan. Walaupun Soekarno bukanlah sosok manusia yang bisa memikat hati seluruh rakyat, namun setidaknya perjuangan beliau dalam membawa bangsa ini ke

¹⁴ A. Ubaedillah, Abdul Rozak, dkk, *op.cit* hal. xi

era kemerdekaan menjadi bukti nyata betapa besarnya perjuangan beliau dalam melepaskan rakyat Indonesia dari belenggu penjajahan.¹⁵

Salah satu dari pemikiran Soekarno yang paling menggugah hati adalah pandangannya tentang demokrasi. Baginya demokrasi politik merupakan sebuah peluang bagi semua lapisan masyarakat agar mempunyai hak yang sama untuk ikut bercampur tangan di dalam politik kenegaraan, hak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota parlement.¹⁶

Kalau dilihat sekilas, memang sistem demokrasi sepertinya sudah bisa menyenangkan hati rakyat secara menyeluruh, karena rakyat berhak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota parlemen, berhak untuk setuju ataupun tidak setuju atas suatu pendapat, berhak membuat dan meniadakan undang-undang sesuai dengan keperluannya. Namun dalam prakteknya, negara yang menganut sistem demokrasi belum bisa memberikan kesenangan, kenyamanan maupun kesejahteraan secara menyeluruh di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seringkali rakyat jelata yang menjadi penghuni sarang kemiskinan dan kaum kapitalis yang menduduki posisi kenegaraan.

Untuk mencapai kesejahteraan rakyat jelata, tidak bisa hanya dengan mengandalkan demokrasi politik saja. Akan tetapi perlu diadakannya pendemokrasian dalam segala bidang, terutama dalam bidang ekonomi.

¹⁵ Iman Toto K. Rahardjo & Herdianto W. K. *“Bung Karno, Wacana Konstitusi Dan Demokrasi*, Jakarta : Grasindo, 2001, hlm. 4-5

¹⁶ Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi*, Jakarta : Panitia Penerbit Di bawah Bendera Revolusi, 1965, hlm. 579

Demokrasi politikpun belum dipandang sempurna kalau tidak dibarengi dengan demokrasi ekonomi.¹⁷

Melihat hal seperti ini, penulis menganggap perlu diadakannya pengkajian ulang terhadap demokrasi itu sendiri. Karena penerapan demokrasi yang kita lihat sekarang ini sudah jauh dari cita-cita dan nilai-nilai yang terkandung dari demokrasi tersebut.. Adapun judul penelitiannya adalah **“Demokrasi ala Soekarno (Demokrasi Terpimpin)”**.

B. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami istilah-istilah yang terdapat didalam penelitian ini, maka penulis merasa perlu memberikan penegasan istilah, yaitu:

Demokrasi: Politik pemerintahan rakyat atau bentuk pemerintahan negara yang segenap rakyat dapat memerintah dengan perantara wakil-wakilnya.¹⁸

Terpimpin : suatu sistem demokrasi yang dijalankan dengan rancangan dan petunjuk-petunjuk tertentu.¹⁹

C. Rumusan dan Batasan Masalah

Dari uraian diatas, penulis mencoba membuat rumusan dan batasan masalah agar mempermudah dan lebih terarahnya penelitian tersebut, maka penulis hanya memfokuskan pada nilai-nilai historis (sejarah) yang

¹⁷ *Ibid* hal. 580

¹⁸ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1982, hlm. 239

¹⁹*Ibid* hlm.755

terkandung dalam demokrasi terpimpin, aspek kemunculannya dan perkembangan demokrasi terpimpin. Sedangkan yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

- (1) Bagaimana sesungguhnya sistem Demokrasi ala Soekarno.
- (2) Apa yang menjadi landasan Soekarno dalam menerapkan sistem Demokrasi, sehingga terlihat ada perbedaan antara sistem Demokrasi Terpimpin yang diterapkan Soekarno dengan system demokrasi lain yang pernah diterapkan di Indonesia.

D. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa hal yang menjadi alasan penulis dalam memilih judul diatas:

1. Dari segi Akademis, Judul yang diangkat sangat relevan dengan bidang yang ditekuni penulis yaitu Jurusan Aqidah Filsafat. Sedangkan dari segi Praktis, demokrasi merupakan salah satu masalah yang dialami sekarang ini. Dimana pergolakan perpolitikan di dunia, khususnya di Indonesia sudah jauh dari apa yang diinginkan oleh rakyat itu sendiri. Demokrasi yang dulunya dianggap mampu memberikan kesejahteraan dan keadilan, justru menjadi gelandang perebutan kekuasaan yang menyebabkan hak-hak orang banyak sering kali dikorbankan.
2. Masalah Demokrasi masih menimbulkan kontroversi (tanda tanya) di kalangan masyarakat pada umumnya dan para elite politik khususnya, sehingga perlu diadakan pengkajian dan penelitian yang mendalam agar dapat memberikan titik terang terhadap demokrasi tersebut.

3. Untuk mengetahui seperti apa sesungguhnya Demokrasi Terpimpin yang diterapkan Soekarno

E. Tujuan Penelitian

Ada beberapa hal yang menjadi tujuan penulis melakukan penelitian tentang konsep demokrasi Soekarno yaitu:

1. Untuk menambah wawasan penulis baik dalam bidang pemikiran maupun politik, serta untuk memperdalam pengetahuan penulis dalam memahami konsep Demokrasi Terpimpin yang diterapkan Soekarno. Dan juga mampu menjadi bahan acuan dan pegangan bagi penulis dalam menela'ah seperti apa sesungguhnya Demokrasi Terpimpin yang dimaksudkan Soekarno.
2. Untuk mengungkap sebuah jawaban yang terpendam dalam sistem Demokrasi Terpimpin. Menurut hemat penulis, ada kesimpang siuran antara sistem Demokrasi Terpimpin yang tawarkan Soekarno dengan pemahaman orang-orang sekarang dalam memandang sistem demokrasi itu sendiri. Dengan kata lain, demokrasi sudah mengalami pemahaman yang berbeda baik dikalangan elit politik, para pemikir maupun masyarakat umum.
3. Untuk mengetahui secara teoritis maupun praktis hal-hal yang berhubungan dengan Demokrasi Terpimpin.

F. Manfaat Penelitian

Dalam kajian pemikiran Soekarno tentang sistem Demokrasi Terpimpin, penulis berharap dengan penelitian singkat ini dapat memberikan kemanfaatan bagi kita, antara lain:

1. Dapat memberikan informasi kepada para peminat kajian politik untuk menambah khazanah keilmuan dalam bidang pemikiran, terutama tentang sistem Demokrasi Terpimpin Soekarno.
2. Bisa menjadi jawaban dari setiap pertanyaan masyarakat tentang sistem demokrasi yang sesungguhnya, sekaligus sebagai bahan perbandingan apakah demokrasi yang kita ketahui memang sudah berjalan sebagaimana mestinya.
3. Sebagai bentuk sumbangsi nyata penulis terhadap dunia politik maupun pemikiran yang lagi berkembang sekarang ini dan juga diharapkan bisa menjadi bahan bacaan ataupun sebagai refrensi bagi penelitian berikutnya.

G. Tinjauan Pustaka

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, maka banyak para ilmuan dan pengarang buku yang mencoba menulis tentang Soekarno. Ada yang mendukung sepenuh hati dengan alasan bahwa demokrasi terpimpin selalu mengedepankan sikap musyawarah dan juga sistem yang terkandung didalamnya tidak menyimpang dari ajaran agama. Serta ada pula secara terang-terangan menentang sistem Demokrasi Terpimpin yang

diproklamlirkan Soekarno, dengan anggapan bahwa system demokrasi tidak mengedepankan keputusan bersama, melainkan hanya sebagai alat bagi Soekarno untuk lebih otoriter

Perdebatan Muhammad Natsir dengan Soekarno tentang peletakan dasar negara menjadi perdebatan yang sangat menarik. Perdebatan itu membahas apakah agama yang menjadi dasar negara atau system demokrasi yang menjadi landasan Negara?. Hal ini akhirnya berujung dengan penolakan Natsir terhadap demokrasi. Dalam system demokrasi, agama dipisahkan dari persoalan Negara, dengan kata lain agama tidak bisa masuk ke ranah pemerintahan dan urusan kenegaraan tidak bisa dicampuri oleh masalah agama. Dalam pandangan Natsir agama dan negara merupakan dua sisi yang saling melengkapi, agama tidak akan berkembang kalau tidak ada negara dan negara akan hampa kalau tidak ada agama. Dalam konteks ini hanya Islamlah yang mampu memberikan kesempurnaan dalam segala aspek, baik politik, pemerintahan dan aspek-aspek lainnya. Bagi Natsir, hanya Islamlah yang mampu membawa bangsa ini ke depan pintu kesempurnaan. Dan sampai kapanpun agama tidak akan bisa dipisahkan dari negara.²⁰

Herbert Faith dan Lance Castles merupakan dua orang sarjana asal Australia yang mencoba mengumpulkan dan menganalisa pemikiran-pemikiran yang muncul dari tahun 1945 sampai 1965. Dalam bukunya yang berjudul "*Indonesian political thinking 1945-1965*" dia menjelaskan, ada tiga

²⁰ Persoalan diatas telah pernah dibahas oleh Reki Hepana dalam tema, *Konstitusi Negara Ideal Menurut Abu A'la Al-Maududi*, Mahasiswa Program Sarjana Strata 1 UIN SUSKA Riau Fakultas Ushuluddin Jurusan Aqidah Filsafat, 2011, hlm. 3

ciri pokok perkembangan pemikiran politik di Indonesia, salah satunya adalah politik demokrasi terpimpin. Pada masa tersebut terjadinya pemaksaan penerimaan terhadap ide-ide politik Soekarno yang mengakibatkan berkembangnya monopoli pemikiran atau monopoli ideologi publik. Dan berakhir dengan tertutupnya mulut rakyat untuk bersuara dan tertahannya pikiran-pikiran rakyat yang tidak sejalan dengannya.²¹

Syarifuddin Jurdi dalam bukunya *Pemikiran Politik Islam Indonesia*, mengatakan bahwa demokrasi terpimpin yang diterapkan Soekarno sejak tahun 1956 tidak mampu membangun Negara yang dapat menegakkan keadilan dan menjamin hak-hak individu dalam kehidupan social politik. Dalam konteks demokrasi sangat sulit untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*, karena kekuasaan digunakan untuk membela kepentingan yang berkuasa. Sementara mereka yang melakukan pertentangan dengan penguasa akan ditindak tegas dan sering kali ditangkap kemudian dipenjarakan. Banyak tokoh-tokoh Islam moderat dikala itu mendapatkan perlakuan yang sama akibat pembangkangan mereka terhadap kebijakan politik demokrasi disaat itu. Dalam pandangan mereka, sikap otoriter yang dilakukan Soekarno sudah menghalangi rakyat untuk hidup dalam kebebasan berkarya dan berekspresi.²²

Sementara itu, Rosihan Anwar dalam bukunya "*Sukarno-Tentara-PKI, Segitiga Kekuasaan Sebelum Prahara Politik 1961-1965*" menjelaskan bahwa

²¹ Alfian, *Pemikiran Dan Perubahan Politik Indonesia*, Jakarta : Pt. Gramedia, 1978, hlm. 100

²² Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Indonesia, Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani Dan Demokrasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 15

pertikaian yang terjadi antara Soekarno, para petinggi militer Angkatan Darat serta Partai Komunis Indonesia, merupakan bentuk dari benturan system demokrasi terpimpin yang dianut Soekarno kemudian melahirkan pemerintahan otoriter. Meruncingnya pertikaian diantara mereka, PKI menjadi tempat pelarian Soekarno dalam menghimpun kekuasaan untuk menyaingi militer angkatan darat yang pada saat itu mulai menguasai dunia perpolitikan di Indonesia.²³

Dengan merujuk pada buku-buku karangan Soekarno dan didukung oleh buku-buku yang berkaitan dengan judul yang diangkat , penulis ingin mengadakan kajian yang berbeda dengan penelitian-penelitian ataupun tulisan-tulisan tentang Soekarno yang sudah ada sebelumnya. Penelitian ini disajikan dalam bentuk skripsi dengan memfokuskan pembahasannya pada nilai kesejarahannya. Adapun yang menjadi ciri khas penlitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah ia lebih menekankan pada aspek yang melatar belakangi lahirnya demokrasi terpimpin sehingga terlihat bagaimana sesungguhnya konsep demokrasi terpimpin dalam pandangan Soekarno.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian kualitatif

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Metode Penelitian Pustaka (*Library Research*),²⁴ yaitu penelitian yang objek utamanya adalah buku-

²³ Rosihan Anwar, *Sukarno, Tentara, PKI, Segitiga Kekuasaan Sebelum Prahara Politik 1961-1965*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2006, hlm. x-xiii

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif , Edisi Revisi*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004, hlm. 157

buku yang berhubungan dengan pemikiran Soekarno tentang demokrasi ataupun literature yang berkenaan dengan pokok pembahasan dalam tulisan ini.²⁵

2. Sumber Data Penelitian

Ada dua macam sumber data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu:

2.a. Data Primer

Yaitu data yang bersumber dari buku-buku asli karangan Soekarno tentang konsep Demokrasi Terpimpin, diantaranya: *Dibawah Bendera Revolusi Jilid 1*, kumpulan pidato Soekarno tentang Demokrasi Terpimpin, *Indonesia Menggugat*, *Indonesia Versus Fasisme* dan buku-buku lain karangan Soekarno yang berhubungan dengan masalah Demokrasi Terpimpin.

2.b. Data Sekunder

Yaitu data-data pendukung yang mempunyai keterkaitan dengan pembahasan yang diangkat penulis, baik berupa buku, naskah/dokumen-dokumen maupun literatur-literatur yang dianggap bisa memperkaya pembahasan tentang demokrasi itu sendiri.²⁶

²⁵ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002, cet ke 3 hlm. 103

²⁶ Cik Hasan Bisri dan Eva Rufaidah, *Model Penelitian Agama Dan Dinamika Social*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002, cet ke 1 hlm. 8

3. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini diperoleh melalui pengumpulan data kepustakaan.²⁷ Dengan cara mengumpulkan berbagai buku-buku, naskah ataupun dokumen-dokumen serta informasi lainnya yang memiliki kaitan dengan pembahasan Demokrasi Terpimpin dalam perspektif Soekarno yang diangkat penulis. Data yang dikumpul kemudian ditela'ah dan diteliti untuk selanjutnya diklasifikasikan sesuai dengan keperluan pembahasan ini. Kemudian data-data yang telah diklasifikasikan disusun secara sistematis sehingga menjadi suatu pembahasan yang jelas dan mudah dipahami maupun dianalisa.

4. Analisis Data.

Data yang sudah dikelompokkan berdasarkan kategori masalah, data kemudian dianalisa dengan “metode analisis”²⁸ dan “metode sistesis”²⁹ untuk kemudian dilakukan operasional analisis, baik secara “reduksi data”³⁰ “kategorisasi”³¹ maupun sintesisasi.

²⁷ *Ibid* hlm. 41

²⁸ Metode analisis adalah cara yang dipakai peneliti untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah dan cara yang dipakai dalam memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk memperoleh kejelasan suatu penelitian. Lihat: Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat, op.cit* hlm. 59

²⁹ Metode sintesis adalah cara yang dipakai peneliti dengan jalan menggabungkan-pengertian yang satu dengan pengertian yang lain agar mendapatkan pengetahuan yang sifatnya baru. Lihat :Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat, ibid* hlm. 61

³⁰ Reduksi data yaitu proses perangkuman data kedalam bentuk uraian yang lengkap dan banyak, kemudian dipilih hal-hal pokok yang dianggap penting sesuai dengan arah penelitian. Lihat Lexy J. Moleong, *Metopel Kualitatif, op.cit* hlm. 288

³¹ Kategorisasi adalah upaya memilah-milah setiap satuan kedalam bagian-bagian yang memilki kesamaan, *ibid* hlm. 288

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan dalam lima bab dengan sub-sub masing-masing bab yaitu:

- Bab I : Pendahuluan, yang terdiri dari latarbelakang masalah, penegasan istilah, rumusan dan batasan masalah, alasan pemilihan judul, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan.
- Bab II : Biografi Soekarno, yang berisikan riwayat hidup Soekarno, karya-karya serta corak pemikirannya.
- Bab III : Demokrasi ala Soekarno (Demokrasi Terpimpin), yang berisikan sejarah kemuculan, azaz yang melahir dan landasan yang dijadikan sebagai pedoman dalam menerapkan Demokrasi Terpimpin serta berbagai aturan yang dipakai dalam Demokrasi Terpimpin.
- Bab IV : Analisis, yang berisikan hasil analisa dari penulis yang berkaitan dengan sistem Demokrasi Terpimpin dalam perspektif Soekarno.
- Bab V : Penutup, yang berisikan hasil kajian secara keseluruhan dalam bentuk Kesimpulan dan Saran.

BAB II

BIOGRAFI SOEKARNO

A. Kehidupan Awal Soekarno

Koesno Sosro Soekarno atau yang sering dipanggil Soekarno lahir pada hari Kamis tanggal 6 Juni 1901 di kampung Lawang Seketeng, Blitar, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Wafat di RSPAD Jakarta pada hari Minggu tanggal 21 Juni 1970 pada umurnya yang ke-69 tahun akibat kesehatannya yang terus memburuk.³² Ia disemayamkan di Wisma Yaso Jakarta dan dimakamkan di Blitar Jawa Timur dekat makam ibundanya, Ida Ayu Nyoman Rai dan Pemerintah menganugerahkannya sebagai "Pahlawan Proklamasi".

Menurut Soekarno, adanya persamaan tanggal dengan bulan kelahirannya yaitu angka enam, membawa pengaruh pada pola pikirnya yang selalu berusaha menempatkan dirinya pada sisi pertengahan diantara dua sisi, hal ini terbukti dengan keinginannya untuk menciptakan keselarasan (*harmony*), kesatuan dan toleransi beragama (*unity and religious tolerance*). Dengan dasar tersebut, maka ia selalu berusaha

³² Tanggal 6 Juni merupakan tanggal resmi kelahiran Soekarno berdasarkan pengakuannya sendiri, lihat: Amanat Presiden Soekarno pada penutupan Mukhtamar NU di Solo tanggal 28 Desember 1962, *Dalam Negara RI Yang Kuat, Agama Dapat Berkembang Subur*, Jakarta : Departemen Penerangan P.C. No 250, hal. 8, Lihat juga: Cindy Adam, *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*, Jakarta: Gunung Agung, 1985, hlm. 21

mencari keselarasan dari setiap aliran-aliran pemikiran yang bertentangan.³³

Dimasa kecil, Soekarno lebih sering dipanggil dengan nama Koesno. Tetapi oleh ayahnya, nama Koesno kemudian diganti dengan Soekarno, dengan alasan bahwa nama Karna (Karno) merupakan sosok seorang pigur pahlawan yang mempunyai sifat arif dan bijaksana dalam kisah wayang mahabrata yang terjadi dalam perang Pandawa dan Kurawa. Melihat hal seperti itu, akhirnya dengan penuh kebahagiaan nama Koesno diganti dengan Soekarno, berharap sosok Karna bisa muncul dalam diri Koesno.³⁴

Dalam keluarga, Soekarno merupakan anak kedua dari dua bersaudara, sedangkan kakaknya yang pertama bernama Sukarmini atau yang sering dipanggil dengan sebutan Ibu Wardoyo. Ayahnya bernama Raden Soekemi Sosrodihardjo dan Ibunya bernama Ida Ayu Nyoman Rai berasal dari Buleleng, Bali.³⁵

Raden Sukemi adalah satu dari delapan anak Raden Harjodikromo yang berasal dari Bangsawan Jawa Kelas Priayi. Sukemi lahir pada tahun 1869 M dan memperoleh pendidikan guru di Probolinggo. Pada diri Sukemi telah dipengaruhi oleh tiga unsur pemikiran yaitu: Pendidikan

³³ Muhammad Ridwan Lubis, *Pemikiran Soekarno Tentang Islam*, Jakarta: Haji Masagung, 1991, cet ke 1, hlm. 57-58

³⁴ Solihin Salam, *Bung Karno Putra Fajar*, Jakarta: Gunung Agung, 1984, cet ke 4 hlm. 18-19

³⁵ <http://kolom-biografi.blogspot.com/2009/01/biografi-presiden-soekarno.html>

Pola Barat, Pendidikan Agama Islam, Paham Teosofi³⁶. Setelah menyelesaikan pendidikan guru (*Kweekschool*), Sukemi kemudian ditugaskan sebagai guru di sekolah biasa di Singaraja, Blitar, Surabaya. Disamping itu, Sukemi juga bekerja sebagai asisten Prof. Van Der Tuuk seorang peneliti ahli bahasa Indonesia yang lama bermukim di Tapanuli. Sedangkan Ida Ayu Nyoman Rai adalah seorang gadis Bali yang menganut agama Hindu berasal dari kasta Brahmana, kasta tertinggi dalam agama Hindu.³⁷

Walaupun kedua orang tua Soekarno berhasil melaksanakan pernikahan, namun terlalu banyak faktor-faktor yang menjadi penghalang akan terlaksananya pernikahan tersebut, diantaranya:

- 1) Adanya perbedaan adat dan kebiasaan antara ayah dan ibu Soekarno
- 2) Perbedaan agama dan keyakinan yang mereka anut.
- 3) Perbedaan status sosial, ayah Soekarno berasal dari Jawa dari kelas priayi sedangkan ibunya berasal dari Bali dari Kasta Brahmana, kasta tertinggi dalam agama Hindu

Dengan melihat persoalan-persoalan yang membelenggu kedua orang tuanya, ada beberapa pelajaran yang ingin diambil oleh Soekarno terkait hal diatas, *Pertama*, kebudayaan Jawa telah membawa dampak dan

³⁶Teosofi adalah filsafat keagamaan, secara harfiah berarti kearifan Ilahiah. Teosofi bertujuan mengajarkan kesempurnaan moral kepada murid-muridnya dan semua orang pecinta kebenaran. Karena itu semboyan yang sering diucapkan perhimpunan teosofi adalah tiada agama (religi) yang lebih tinggi dari kesempurnaan moral. *op.cit* hlm. 20

³⁷ <http://www.scribd.com/doc/20796228/BIOGRAFI-SOEKARNO>

pengaruh yang besar dalam pribadi maupun pemikirannya. Kebudayaan Jawa mampu membentuk perkembangan Islam di Jawa yang berwujud pada pola sinkretis³⁸ dan puritan³⁹ yang ditampilkan dalam pewayangan. *Kedua*, persoalan keluarga yang terjadi antara ayah dan ibunya dilatar belakangi oleh paham sentimental kedaerahan dan agama. Persoalan seperti ini akan melahirkan benih-benih pertentangan antar kelompok sosial dan bisa memecah belah integrasi suatu bangsa⁴⁰.

Semasa hidup, Soekarno telah mempunyai tiga orang istri dan dikaruniai delapan orang anak. Dari istrinya yang pertama, Fatmawati, ia dikaruniai lima orang anak yang bernama: Guntur, Megawati, Rachmawati, Sukmawati dan Guruh, sedangkan dari istrinya yang kedua Hartini, ia mempunyai dua orang anak yang bernama Taufan dan Bayu dan dari istrinya yang ketiga Ratna Sari Dewi, wanita turunan Jepang bernama asli Naoko Nemoto dikaruniai satu orang anak yang bernama Kartika.⁴¹

B. Masa Pendidikan Soekarno.

Dimasa kecil, Soekarno hanya beberapa tahun hidup bersama orang tuanya di Blitar. Masa kanak-kanak banyak ia habiskan di Tulung Agung bersama kakeknya, Raden Hardjodikromo. Disana ia hidup dalam belaian kasih sayang kakeknya. Di usianya yang ke 6 tahun, kakeknya pun

³⁸ Sinkretis ialah penyatuan unsur-unsur Pra-Hindu, Hindu dan Islam yang ditampilkan dalam bentuk cerita yang diperankan oleh wayang. *op.cit* hlm 20

³⁹ Puritan ialah unsur yang berusaha mengikuti ajaran Islam dengan taat. *Ibid* hlm. 21

⁴⁰ Muhammad Ridwan Lubis, *op.cit* hlm. 59

⁴¹ <http://www.scribd.com/doc/20796228/BIOGRAFI-SOEKARNO>

memasukkan Soekarno ke Sekolah Dasar Desa di Tulung Agung. Pada awalnya, hingga beberapa tahun kemudian, tidak ada perkembangan pengetahuan dalam diri Soekarno. Melihat hal tersebut, Soekarno dipindahkan ke Sekolah Dasar 02 di Sidoardjo. Beberapa tahun kemudian ia pun dipindahkan lagi ke sekolah 01 Mojokerto. Disini ia mulai menjadi siswa yang rajin dan pandai, melebihi kawan-kawannya. Ketika berumur 12 tahun ia sudah berada di kelas 6 sekolah dasar. Karena kecerdasan yang dimilikinya, ia kembali dipindahkan dan dimasukkan ke sekolah “*Europeese Lagere School (ELS)*” Mojokerto. Disana ia diterima di kelas 5 hingga menamatkan sekolah pada tingkat dasar.⁴²

Pada usianya yang ke 14 tahun, seorang kawan bapaknya yang bernama Haji Oemar Said Tjokroaminoto mengajak Soekarno tinggal di Surabaya dan di sekolahkan ke Hoogere Burger School (HBS), disana beliau belajar sambil mengaji di tempat Tjokroaminoto. Di Surabaya, Soekarno banyak bertemu dengan para pemimpin Sarekat Islam, organisasi yang dipimpin Tjokroaminoto saat itu. Disisi lain, Soekarno juga bergabung dengan organisasi Jong Java (Pemuda Jawa).

Saat belajar di HBS, Soekarno mulai mengenal dan mendalami jiwa Nasionalisme.⁴³ Disana beliau banyak mendapatkan pendidikan dan pelajaran, baik dari Tjokroaminoto maupun dari tokoh-tokoh nasional yang sangat terkenal dimasa itu seperti: KH. Ahmad Dahlan, Tjipto Mangunkusumo, Agus Salim, Suryaniggrat maupun dengan E.F.E Douwes

⁴² Solichin Salam, *op.cit* hlm. 24

⁴³ Lambert Gibels, *Soekarno Biografi 1901-1950*, Jakarta : Garsindo 2001, cet ke 2 hlm. 21

Dekker yang saat itu merupakan pemimpin organisasi National Indische Partij.⁴⁴

Setelah lulus dari HBS tahun 1920, Soekarno kemudian pindah ke Bandung dan melanjutkan studinya ke THS (Technische Hooge-School) atau sekolah Tinggi Teknik yang sekarang menjadi ITB (*Institute Teknologi Bandung*) dan meraih gelar Insinyur pada tanggal 25 Mei 1926.⁴⁵

C. Karya-Karya Soekarno

Sumbangi pemikiran Soekarno di dunia Islam maupun politik sudah menjadi perbincangan semua kalangan, baik dari kalangan bawah hingga kalangan atas. Dari kedua kalangan tersebut, ada yang betul-betul setuju dan sejalan dengan pemikiran Soekarno serta tidak sedikit pula yang menentang pemikirannya. Walaupun demikian, Soekarno akan selalu dikenang sebagai seorang pemikir besar yang mempunyai jiwa kepahlawanan terhadap kemerdekaan bangsa. Semua gagasan yang beliau berikan baik dalam bentuk tulisan maupun lisan hampir semuanya berisikan semangat perjuangan dan pembaharuan.

Dalam dunia kesejarahan Indonesia, Soekarno dikenal sebagai sosok pemimpin yang suka membaca dan menulis. Beliau selalu haus akan ilmu pengetahuan, baik ilmu yang membahas tentang pemikiran Barat dan Timur maupun ilmu yang berhubungan dengan masalah-masalah keislaman. Hampir seluruh tulisan-tulisan beliau menjadi incaran bagi orang-orang yang ingin mendalami ilmu politik dan pemikiran. Akan

⁴⁴ *Ibid* hlm. 24-25

⁴⁵ Simpatisan Pembela Pancasila 1 Juni, *Bung Karno Dan Pidato Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945*, Agustus 2008, cet ke 2 hlm. 6

tetapi dari kesemua tulisan-tulisan tersebut, hanya beberapa buah tulisan yang ia buat dalam bentuk buku. Kebanyakan tulisan-tulisan Soekarno dimuat dalam artikel-artikel ataupun media cetak (koran) dimasa itu.

Adapun buku-buku yang pernah ditulis Soekarno diantaranya :

1).”*Dibawah Bendera Revolusi*” *Jilid I dan II*, yang mana dalam kedua jilid buku tersebut, hampir seluruh tulisan Soekarno berisikan semangat revolusi dan nasionalisme. Bagi seorang Soekarno, kemerdekaan adalah hak segala bangsa maka dari itu penjajahan diatas dunia harus kita hapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.⁴⁶

Hal tersebut hanya dapat kita raih dengan adanya perjuangan. Perjuangan tidak akan bisa kita gapai tanpa adanya semangat dan rasa Nasionalisme yang menggelora dalam diri rakyat Indonesia. Kemerdekaan bukanlah titipan dari Tuhan yang Maha Esa ataupun kado dari nenek moyang kita, akan tetapi kemerdekaan merupakan hasil dari revolusi.

2). “*Sarinah*”, judul buku sarinah diambil dari nama pembantu Soekarno itu sendiri. Sosok Sarinah telah membawa dampak yang positif dalam perkembangan pemikiran Soekarno. Darinya, Soekarno belajar akan kemandirian dan keteladanan. Dalam buku ini, tersirat sebuah pesan maupun amanat dari Soekarno kepada kaum perempuan umumnya dan bangsa Indonesia khususnya. Semua orang harus menyadari bahwa, persoalan negara ataupun bangsa adalah persoalan laki-laki dan perempuan. Dan tidak ada satu bangsa atau negara manapun dapat meraih

⁴⁶ Kalimat diatas tertuang dalam pembukaan UUD (Undang-Undang Dasar 1945) Lihat: Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945

kemajuan, kalau laki-laki dan perempuan tidak satu dalam kesatuan. Jangan harap laki-laki akan maju subur tanpa diikuti dengan kemajuan kaum perempuan. Dan laki-laki jangan mengira bahwa bisa ditanamkan suatu kultur yang baik dan wajar kalau perempuan dihinakan atau dikesampingkan dalam kultur tersebut.⁴⁷

3).”*Indonesia Menggugat*”, buku ini berisikan pidato penggugatan sekaligus pembongkaran yang disampaikan Soekarno atas kelicikan-kelicikan yang dilakukan bangsa Belanda terhadap rakyat Indonesia. Buku ini sekaligus menjadi *Pledoi* (buku pegangan) bagi Partai Nasional Indonesia (PNI).⁴⁸

4).”*Mencapai Indonesia Merdeka*”, buku ini merupakan buku penggugut dari buku KIM (*Kearah Indonesia Merdeka*) karya Muhammad Hatta. Buku “*Mencapai Indonesia Merdeka*” ditulis Soekarno ketika beliau sudah keluar dari penjara Sukamiskin dan mulai memimpin Partindo (Partai Indonesia).

Walaupun Soekarno hanya menulis beberapa buah buku, bukan berarti tulisan-tulisan beliau yang lain diabaikan orang. Malahan banyak tulisan-tulisan dan pidato-pidato Soekarno yang sudah dikumpulkan para ilmuan kemudian dicetak menjadi sebuah buku.

D. Aktivitas Politik Soekarno

Dalam sejarah bangsa Indonesia, partai politik PNI (Partai Nasional Indonesia) merupakan partai Nasionalis pertama yang didirikan

⁴⁷ Simpatisan Pembela Pancasila *op.cit* hlm. 69-70, lihat juga dalam buku *Sarinah*, hlm. 14&17

⁴⁸ *Ibid* hlm. 6

oleh Soekarno pada tanggal 4 Juli tahun 1927. PNI didirikan sebagai wadah dalam menyusun strategi untuk mencapai tujuan dalam meraih kemerdekaan Indonesia. Melihat tujuan seperti itu, maka pada tanggal 29 Desember 1929 Belanda memasukkan Soekarno ke penjara Sukamiskin Bandung. Delapan bulan kemudian baru disidangkan dan dalam pidato pembelaannya di Landraad, Bandung yang berjudul “*Indonesia Menggugat*”, beliau menunjukkan kemurtadan dan kelicikan bangsa Belanda. Mendengar pidato pembelaan tersebut, membuat Belanda makin marah, sehingga pada Juli 1930 PNI pun dibubarkan.⁴⁹

Akhirnya pada tahun 1931 Soekarno pun bebas. Setelah itu beliau diajak untuk bergabung ke dalam Partindo (Partai Indonesia) dan sekaligus ditunjuk sebagai pemimpin partai. Pada tahun 1933 beliau pun kembali ditangkap Belanda dan dibuang ke Ende, Flores. Empat tahun kemudian ia pun dipindahkan ke Bengkulu hingga Jepang masuk ke Indonesia. Setelah melalui perjuangan yang cukup panjang, maka pada tahun 1942 ia pun bebas.

Dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 Soekarno mencetuskan Pancasila sebagai Dasar dan Falsafah Negara Indonesia Merdeka. Pancasila lalu dimasukkan ke dalam pembukaan UUD 1945. Tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dalam sidang PPKI, 18

⁴⁹ *Ibid* hlm. 7

Agustus 1945 Soekarno terpilih secara aklamasi sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama pada periode 1945 -1966.

Beliau selalu berupaya mempersatukan bumi nusantara ini dalam satu kesatuan yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bahkan Soekarno berusaha menghimpun bangsa-bangsa di Asia-Afrika dan Amerika Latin dengan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955 yang kemudian berkembang menjadi Gerakan Non Blok.

E. Corak Pemikiran Soekarno.

1) Nasionalisme

Perkembangan paham nasionalis di Indonesia mulai berkembang sekitar tahun 1921. Dalam hal ini, Soekarno banyak terpengaruh oleh pemikiran HOS Tjokroaminoto yang pada saat itu masih memimpin Partai Serikat Islam sekaligus Partai Nasionalis.⁵⁰

Meskipun pada dasarnya Soekarno lebih kental dengan nuansa demokratis, akan tetapi beliau sangat menjunjung tinggi nasionalis. Pemikiran ini muncul dari seorang Soekarno pada saat menipisnya rasa kebangsaan dalam masyarakat dan berkembangnya paham kesukuan/kedaerahan. Dia melihat bahwa solusi yang sangat diperlukan ketika itu adalah persatuan seluruh rakyat Indonesia dari segala kalangan untuk bangkit melawan keterjajahan. Namun realitas yang ada ternyata masyarakat Indonesia terpecah belah dalam berbagai kelompok dan latar belakang yang berbeda.

⁵⁰ Lambert Gibels, *op.cit* hlm. 51

Berangkat dari kenyataan tersebut Soekarno bangkit dan menyadarkan rakyat Indonesia bahwa kemerdekaan tidak akan terwujud jika kekuatan dari semua rakyat ini tidak disatukan. Dengan demikian, tidak peduli latar belakang kehidupan, dari segi ekonomi, religiusitas dan aliran pemikiran, hendaknya semua kalangan harus bersatu padu untuk mencapai satu tujuan yaitu kemerdekaan.⁵¹

2) Islamisme

Menurut Soekarno, Islam tidak bertentangan dengan akal, maka untuk penafsiran yang lebih relevan dengan masa kebangkitan, tidak ada salahnya memberikan interpretasi terhadap agama Islam dan sumbernya tentang nilai-nilai sosial dengan mengedepankan akal rasional. Untuk mencapai kemajuan umat seharusnya lebih kreatif, memandang agama tidak asal terima saja, hendaklah akal digunakan semaksimal mungkin. Dalam hal ini akan terlihat bahwa akal benar-benar digunakan untuk memahami agama Islam secara utuh sesuai dengan perkembangan zaman dimana masyarakat itu terus berkembang. Hal yang demikian ini menurut Soekarno sama sekali tidaklah merugikan Islam.⁵²

Dari beberapa pendapat Soekarno sebagai mana tertulis di atas, dapat dilihat bahwa pemikirannya mengenai Islam sangat dipegaruhi oleh

⁵¹ Persoalan mengenai ini telah dibahas oleh penulis pada penyajian makalah study Filsafat Islam V, yang di bimbing oleh Prof. Dr. Afriral M, M.A. Pada hari Selasa 15 Desember 2010 fakultas Ushuluddin UIN SUSKA Riau.

⁵² Husnan Bey Fananie, *Membaca Kembali Pemikiran Soekarno Tentang Islam Dan Demokrasi*, Jurnal Himpunan Peminat Ilmu Ushuluddin, Vol 1 No.1 2010/1432 hlm. 81

beberapa pemikir rasionalis Islam seperti, Farid Wadjudi, Sjakib Arselan, Muhammad Ali, dan satu nama lagi yang mendapat tempat dalam pemikiran rasionalis Soekarno yaitu, Sayyid Amir Ali. Pemikiran rasional yang berkembang ketika itu sangat mempengaruhi pemikiran Soekarno terutama ketajaman rasionalitasnya dalam berfikir.

Secara garis besar, pemikiran Soekarno tentang Islam dapat disimpulkan menjadi tiga prinsip, *pertama*, tidak ada agama kecuali Islam yang lebih mementingkan persamaan, semua orang Islam memiliki hak yang sama dalam berpartisipasi terhadap Islam, oleh karena itu jangan ada yang memonopoli pemahaman tentang Islam. *Kedua*, Islam pada dasarnya adalah rasional dan sederhana, hal ini menurut Soekarno untuk menerangkan kelebihan Islam dibanding dengan agama lain. *Ketiga*, Islam berarti kemajuan, menurut Soekarno Islam telah cukup mengandung potensi kemajuan, yang berpangkal pada konsep tauhid, dan sifat elastisitas hukum Islam.⁵³

⁵³ *Ibid* hlm. 82

BAB III

Demokrasi Ala Soekarno (Demokrasi Terpimpin)

A. Masa Pra - Demokrasi Terpimpin (1945-1959)

1. Sejarah Lahirnya Demokrasi Terpimpin

Terlalu banyak peristiwa-peristiwa yang menyelimuti lahirnya Demokrasi Terpimpin yang menurut hemat penulis semua peristiwa tersebut tidak mungkin bisa diungkap satu persatu dalam tulisan yang singkat ini. Tapi yang jelas dalam perjalanan sejarah, perkembangan sistem demokrasi yang pernah ada di Indonesia mulai dari tahun 1945-1959 telah mengalami pasang surut yang tidak henti-hentinya. Perdebatan dan perbedaan pendapat dalam memilih sistem ketatanegaraan terus berlanjut di kalangan para pejuang kemerdekaan ketika itu. Walaupun saat itu Indonesia telah resmi memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi negara yang merdeka, namun UUD 1945 yang diresmikan tanggal 18 Agustus 1945 belum mampu menerapkan sistem presidensill sebagaimana yang tertuang di dalamnya.⁵⁴ Hal ini menunjukkan bahwa, masih adanya segelintir rakyat Indonesia yang belum sepakat dalam menetapkan sistem demokrasi apa yang dipakai dalam menjalankan roda pemerintahan.

⁵⁴ Wawan Tunggul Alam, *Demi Bangsa, Pertentangan Sukarno Vs Hatta*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 155

Prinsip Dwitunggal⁵⁵ yang berkembang di masa-masa awal kemerdekaan, akhirnya membuka ruang bagi Muhammad Hatta untuk lebih berperan penting dalam mengatur pemerintahan. Kurangnya peranan Soekarno ketika itu berdampak pada perkembangan dunia perpolitikan yang berjalan lamban. Melihat hal seperti ini, maka pada tanggal 16 Oktober 1945 Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)⁵⁶ yang pada saat itu bertugas membantu Presiden menjalankan roda pemerintahan, mengadakan rapat untuk mendesak Muhammad Hatta yang berkedudukan sebagai Wakil Presiden agar mengeluarkan maklumat. Maka pada tanggal 3 November 1945 keluarlah Maklumat Presiden yang hanya ditanda tangani oleh Muhammad Hatta. Maklumat tersebut berisikan anjuran pembentukan partai-partai politik, yang mana ditegaskan sebagai berikut:

Pertama: Pemerintah mendukung timbulnya partai-partai politik agar dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala aliran yang ada dalam masyarakat.

Kedua : Pemerintah berharap supaya partai-partai politik telah tersusun sebelum dilangsungkan pemilihan anggota badan-badan perwakilan rakyat pada Januari 1946.⁵⁷

Dengan dikeluarkannya maklumat tersebut, akhirnya membuka kesempatan bagi masyarakat luas untuk mendirikan partai-partai politik.

⁵⁵ Dwitunggal yaitu Wakil Presiden mempunyai wewenang dalam mengeluarkan maklumat/ketetapan tanpa harus dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan Presiden. *Ibid* hlm. 1

⁵⁶ KNIP merupakan Badan Komite yang dibuat oleh Soekarno sebagai penjelmaan kebulatan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berkedaulatan ditangan rakyat. Pada waktu sebelum dikeluarkannya Maklumat 3 November 1945, badan ini hanya bertugas sebagai pembantu Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan. Tetapi setelah dikeluarkannya maklumat tersebut, komite ini berubah menjadi badan yang memegang dua jabatan, *Pertama* sebagai pembantu Presiden, *Kedua* sebagai badan yang menjalankan tugas yang dipegang Legislatif. *Ibid* hlm. 5

⁵⁷*Ibid* hlm. 234

Terhitung dari tanggal dikeluarkannya maklumat sampai Mei 1946, jumlah partai politik mencapai 137 partai. Akibatnya, kehidupan kepartaian berkembang tidak sehat, pengkudetaan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 semakin berlanjut. Sistem Presidensil yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 akhirnya berubah menjadi Sistem Parlemerter. Sistem Parlemerter yang mulai diberlakukan dua bulan sesudah kemerdekaan diproklamirkan dan diperkuat dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1949-1950, ternyata kurang cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia.⁵⁸ Persatuan yang digalang selama menghadapi penjajahan menjadi kendur dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan-kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan tercapai. Hal ini disebabkan karena lemahnya benih-benih Demokrasi Parlemerter memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat.⁵⁹

Sebagai akibat dari penerimaan Demokrasi Parlemerter dengan sistem multi partai, maka dalam kurun waktu 14 tahun (1945-1959) tercatat tujuh kali terjadi pergantian kabinet, ini berarti umur rata-rata kabinet hanyalah berkisar lebih kurang 15 bulan saja, akan tetapi ada kabinet-kabinet tertentu yang mampu bertahan lebih dari 2 tahun. Hal ini

⁵⁸ Rusadi Kartaprawira, *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar*, Bandung: Sinar Baru, 1977, hlm. 193

⁵⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998, hlm. 69-70

menunjukkan bahwa partai politik yang berkuasa ketika itu mampu menjatuhkan pemerintahan yang sedang berjalan.⁶⁰

Terjadinya Agresi Militer I dan II yang dilakukan oleh pasukan Belanda terhadap Indonesia menjadi bukti dari ketidak mampuan Demokrasi Parleментар dalam menstabilisasi urusan pemerintahan, dan akhirnya berdampak pada tatanan kenegaraan yang berubah dari Negara yang berbentuk Kesatuan menjadi Negara Federasi (Serikat). Sehingga pada tanggal 17 Januari 1948 terjadi perjanjian Renville antara rakyat Indonesia dengan Negara Belanda, yang mana perjanjian tersebut berisikan pembentukan Republik Indonesia sebagai bagian dari suatu Negara Indonesia Serikat yang turut dalam suatu Uni dengan Belanda yang dikepalai Ratu Belanda.⁶¹

Melihat hal seperti ini, maka usaha-usaha untuk membentuk kembali negara kesatuan semakin meningkat. Rakyat di daerah-daerah melakukan kegiatan-kegiatan unjuk rasa seperti pemogokan untuk menyatakan keinginannya agar bergabung dengan Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta. Menghadapi gerakan-gerakan rakyat tersebut, penguasa-penguasa setempat yang ada di berbagai daerah masih terdiri dari bangsa Belanda, seringkali mengambil reaksi keras dan mengadakan penangkapan. Disisi lain, golongan federalis (yang

⁶⁰ Mahfud Md, *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia, Studi Tentang Interaksi Politik Dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Jakarta : Pt. Rineka Cipta, 2003, hlm. 48-49

⁶¹ Wawan Tunggul Alam, *op.cit* hlm. 248-249

mendukung berdirinya Negara Serikat) malahan mengadakan kontra aksi dan demonstrasi.⁶²

Atas desakan-desakan yang dilakukan rakyat ketika itu, maka pada tanggal 19 Mei 1950 diadakanlah perundingan antara RIS dengan RI untuk membentuk kembali Negara Kesatuan Indonesia. Akhirnya perundingan itu membuahkan hasil bagi RI. Pada tanggal 15 Agustus 1950 Soekarno membacakan piagam terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan tanggal 17 Agustus 1950 diproklamkan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka saat itu juga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (UUD RIS) yang berlaku ketika itu dicabut dan diberlakukannya kembali UUDS 1950.⁶³

Undang-Undang Dasar Sementara yang menetapkan berlakunya sistem parlementer yang mana badan eksekutif terdiri dari Presiden sebagai kepala negara konstitusional beserta menteri-menterinya mempunyai tanggung jawab politik. Keberlangsungan hidup partai-partai politik setiap kabinet berdasarkan pada koalisi yang berkisar satu atau dua partai besar dengan beberapa partai kecil.

Koalisi ternyata kurang baik untuk diterapkan dan partai-partai dalam koalisi tidak segan-segan untuk menarik dukungannya sewaktu-waktu, sehingga kabinet sering kali jatuh karena keretakan dalam koalisi

⁶² Hak Cipta Secretariat Negara Republic Indonesia, *30 Tahun Indonesia Merdeka*, Jakarta: Pt. Citra Lamtoro Gung Persada, 1977, hlm. 43

⁶³ *Ibid* hlm. 42-43

sendiri. Dengan demikian, ditimbulkan kesan bahwa partai-partai dalam koalisi kurang dewasa dalam menghadapi tanggung jawab mengenai permasalahan pemerintahan. Di lain pihak partai-partai dalam barisan oposisi tidak mampu untuk berperan sebagai oposisi yang konstruktif yang menyusun program-program alternatif, tetapi hanya menonjolkan segi-segi negatif dari tugas oposisi.

Disamping itu, ternyata ada beberapa kekuatan sosial dan politik yang tidak memperoleh saluran dan tempat yang realistis dalam konstelasi politik, padahal mereka merupakan kekuatan sosial-politik yang paling penting. Ditambah lagi dengan tidak mampunya anggota-anggota partai yang tergabung dalam konstituante untuk mencapai konsensus mengenai dasar negara untuk membuat undang-undang baru. Hal seperti ini menambah lengkapnya permasalahan yang dihadapi dalam periode Demokrasi Parlemerter dengan sistem multi partai. Karena semakin rumitnya persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia mulai dari tahun 1945-1959, maka Soekarno yang menjabat sebagai Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959⁶⁴ dengan berisikan memberlakukan kembali UUD 1945 dan mengganti Demokrasi Parlemerter dengan Demokrasi

⁶⁴Dekrit Presiden 5 Juli adalah suatu pernyataan yang diucapkan Presiden Soekarno di depan Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 5 Juli 1959 yang antara lain mengatakan: 1. Pembubaran konstituante (lembaga pembuat undang-undang dasar). 2. Berlakunya kembali UUD 1945. 3. Membentuk MPRS dan DPAS dalam jangka waktu tidak lama lagi. Lihat: Cheppy Hari Cahyono & Suparlan Alhakim, *op,cit* hlm. 88

Terpimpin. Peristiwa ini sekaligus menjadi awal lahirnya Demokrasi Terpimpin dan akhir dari periode Demokrasi Parlementer.⁶⁵

2 Faktor-Faktor Lahirnya Demokrasi Terpimpin

Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi lahirnya Demokrasi Terpimpin adalah:

- a. Adanya rasa tidak puas terhadap hasil-hasil yang dicapai sejak tahun 1945 karena belum mendekati cita-cita dan tujuan proklamasi seperti masalah kemakmuran dan pemerataan keadilan yang tidak terbina. Belum utuhnya wilayah RI karena masih ada wilayah yang masih dijajah Belanda. Instabilitas nasional yang ditandai oleh jatuh banggunya kabinet sampai 17 kali, serta pemberontakan yang terjadi didaerah-daerah. Kegagalan tersebut disebabkan menipisnya rasa nasionalisme, pemilihan Demokrasi Liberal yang tanpa pemimpin dan tanpa disiplin. Suatu demokrasi yang tidak cocok dengan kepribadian Indonesia. Serta sistem multi partai yang didasarkan pada Maklumat Pemerintah 3 November 1945 yang ternyata partai-partai itu digunakan sebagai alat perebutan kekuasaan dan bukan sebagai alat pengabdian negara.
- b. Ketidak mampuan Demokrasi Parlementer mewujudkan amanat penderitaan rakyat. Karena itu, perlu diadakannya suatu koreksi untuk segera kembali pada cita-cita dan tujuan semula, harus dilakukan

⁶⁵ Miriam Budiardjo, *op.cit* hlm. 70

dengan cara meninjau kembali sistem politik. Harus diciptakan suatu sistem demokrasi yang menuntun untuk mengabdikan kepada negara dan bangsa yang beranggotakan orang-orang jujur. Cara yang harus ditempuh untuk melaksanakan koreksi tersebut adalah:

- Mengganti sistem *free fight liberalism* dengan Demokrasi Terpimpin yang lebih sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Dalam Demokrasi Terpimpin perlu dibentuk suatu Kabinet Gotong Royong⁶⁶ yang anggotanya terdiri dari semua partai dan organisasi berdasarkan perimbangan kekuatan yang ada dalam masyarakat.
- Dewan Perancang Nasional akan membuat *blue print* masyarakat yang adil dan makmur.
- Pembentukan Dewan Nasional yang terdiri dari golongan-golongan fungsional dalam masyarakat. Tugas utama Dewan Nasional adalah memberi nasehat kepada kabinet baik diminta maupun tidak diminta.
- Hendaknya konstituante tidak menjadi tempat berdebat yang berlarut-larut dan segera menyelesaikan pekerjaannya agar *blue print* yang dibuat Depernas dapat didasarkan pada konstitusi baru yang dibuat konstituante.

⁶⁶ Berdasarkan Ketetapan Presiden No 4 tahun 1960 tanggal 24 Juni 1960, maka Dewan Perwakilan Rakyat dan Cabinet Gotong Royong resmi dilantik untuk menggantikan DPR hasil pemilihan umum tahun 1955 yang dibubarkan tanggal 5 Maret 1960 dengan berdasarkan Ketetapan Presiden No. 3 tahun 1960. Dengan alasan, DPR hasil pemilu 1955 berselisih pendapat dengan pemerintah mengenai Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk tahun 1961.

- Hendaknya konstituante meninjau dan memutuskan masalah Demokrasi Terpimpin dan masalah kepartaian.
- Perlu adanya penyederhanaan sistem kepartaian dengan mencabut Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 yang telah memberi ruang bagi sistem multi partai dan menggantinya dengan Undang-Undang Kepartaian serta Undang-Undang Pemilu.⁶⁷

3. Asas Yang Melahirkan Sistem Demokrasi Terpimpin

Wacana tentang Demokrasi Terpimpin bukanlah sesuatu yang baru muncul ketika dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, akan tetapi wacana tersebut sudah terlintas dalam diri Soekarno bertahun-tahun sebelum diterapkannya Demokrasi Terpimpin tersebut. Bagi Soekarno, Demokrasi Parlemen yang dipakai bangsa Indonesia merupakan produk impor yang tidak sesuai dengan keadaan sosial masyarakat kita dan demokrasi tersebut tidak menjiwai cita-cita bangsa Indonesia.⁶⁸

Berkaitan dengan persoalan di atas maka hampir dari seluruh pidato yang disampaikan Soekarno, kebanyakan berisikan sekaligus menjelaskan tujuan tentang Demokrasi Terpimpin. Tetapi dalam hal ini yang perlu disorot adalah asas/dasar yang melahirkan Demokrasi

⁶⁷ Mahfud Md, *ibid* hlm. 54-55 cet ke 2. Lihat dalam pidato kenegaraan Soekarno dalam rangka peringatan HUT RI yang ke 12 tahun 1957 di Istana Negara. Lihat juga pidato Soekarno tanggal 21 februari 1957

⁶⁸ Soegiarso Soerojo, *Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai, G30S-PKI dan Peran Bung Karno*, Jakarta : Pt. Intermasa, 1988, cet ke 4 hlm. 127. Hal yang sama juga pernah disampaikan Soekarno dalam pidatonya tanggal 21 Februari 1957

Terpimpin itu sendiri. Merujuk pada pidato yang disampaikan Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945⁶⁹, ada dua asas yang mendukung lahirnya demokrasi terpimpin yaitu:

Petama, Mufakat, Permusyawaratan dan Perwakilan. Negara Indonesia bukanlah satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan, walaupun golongan kaya. Tetapi tujuan didirikan negara Indonesia “semua buat semua dan satu buat semua”.

Menurut Soekarno, syarat mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah dengan mewujudkan dasar permusyawaratan dan perwakilan. Untuk pihak Islam, inilah tempat yang terbaik untuk memelihara agama. Dengan cara mufakat, umat Islam bisa memperbaiki segala hal, juga keselamatan agama, yaitu dengan jalan pembicaraan/permusyawaratan di dalam Badan Perwakilan Rakyat. Hal-hal yang belum memuaskan bisa dimusyawarahkan. Badan perwakilan inilah tempat untuk mengemukakan tuntutan-tuntutan Islam. Disinilah rakyat mengusulkan kepada pemimpinnya segala hal yang dirasa perlu bagi perbaikan bangsa. Bagi umat Islam, disinilah saatnya untuk berjuang dan bekerja keras memilih utusannya yang duduk di badan perwakilan.⁷⁰

Malahan rakyat harus yakin, kalau yang menduduki badan perwakilan mayoritas Muslim, pemuka-pemuka Islam, maka dengan sendirinya hukum-hukum yang keluar dari Badan Perwakilan Rakyat itu hukum Islam pula. Kalaulah hal yang demikian itu terjadi, barulah boleh dikatakan bahwa agama Islam benar-benar hidup dalam jiwa rakyat Indonesia yang mayoritas Muslim, sehingga 60-90 % utusannya adalah orang Islam, pemuka-pemuka Islam, ulama-ulama Islam maka hiduplah

⁶⁹ 1 Juni 1945 merupakan hari lahirnya Pancasila. Yang mana pada tanggal tersebut untuk pertama kalinya butiran-butiran tentang dasar Negara Indonesia yang disampaikan Soekarno dalam pidatonya dihadapan rakyat Indonesia dan pemerintah Jepang

⁷⁰ Soekarno, *Pidato Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945*, Simpatisan Pembela Pancasila, Agustus 2008, cet ke 2 hlm. 41

Islam Indonesia dan bukan Islam yang hanya di atas bibir saja. Tetapi kenyataan yang ada dalam sidang Lembaga Konstituanta dan DPR hanya beberapa persen saja yang memberikan suaranya kepada Islam.⁷¹

Hal itu menjadi bukti bahwa Islam belum betul-betul hidup di kalangan ummat Islam bangsa ini. Disinilah diperlukannya dasar permusyawaratan dan perwakilan. Tidak ada satu bangsa pun yang betul-betul hidup kalau di dalam Badan Perwakilan Rakyatnya tidak ada perjuangan paham di dalamnya. Baik ummat Islam maupun ummat Kristen, perjuangan selamanya akan selalu ada. Dalam hal ini Soekarno mengistilahkan dengan *menumbuk membersihkan gabah, supaya keluar daripadanya beras, dan beras itu akan menjadi nasi Indonesia yang sebaik-baiknya*. Mari jadikan permusyawaratan dan perwakilan sebagai tempat mempro-pagandakan ide-ide rakyat dengan cara yang berkebudayaan.⁷²

Kedua, kesejahteraan dan keadilan sosial, tidak akan ada lagi kemiskinan di dalam Indonesia merdeka. Prinsip ini merupakan suatu jembatan yang bisa dijadikan sebagai alat untuk menyeberang dari paham kapitalis dan imprealis yang selama ini membelenggu kehidupan rakyat Indonesia. Kedua paham tersebut telah menghalangi bangsa ini dalam meraih alam demokrasi politik dan demokrasi sosial ekonomi.⁷³

⁷¹ *Ibid* hlm. 42-43

⁷² Iman Toto K. Rahardjo & Herdianto WK, *Bung Karno Dan Tata Dunia Baru*, Jakarta: Pt. Grasindo, 2001, hlm. 22

⁷³ *Ibid* hlm. 23

Demokrasi yang mengatur sistem pemerintahan di Indonesia hendaknya jangan demokrasi Barat. Tetapi demokrasi yang “dipimpin oleh khidmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Inilah demokrasi Indonesia yang memberi ruang untuk hidupnya demokrasi politik dan ekonomi, serta mampu mendatangkan kesejahteraan sosial. Rakyat Indonesia sudah lama mendambakan hal seperti ini, hidup dalam berkecukupan dan mampu membangun dunia baru yang di dalamnya tertanam rasa keadilan dan kemakmuran. Tentu dalam hal ini pemerintah menjadi pengontrol dalam proses jalannya politik, sosial dan ekonomi.⁷⁴

Oleh karena itu, jikalau memang betul-betul mengerti, mengingat dan mencintai rakyat Indonesia, marilah kita pupuk prinsip tersebut. Bukan saja rasa keadilan dalam berpolitik, tetapi juga keadilan dalam masalah ekonomi. Dengan demikian, kesejahteraan bersama yang kita harapkan akan selalu terjaga dengan sebaik-baiknya.

4. Defenisi Demokrasi Terpimpin

Kata Demokrasi Terpimpin, kemungkinan semua orang sudah pasti pernah mendengarnya, namun jarang sekali diantara yang mendengarkan tau apa sebetulnya pengertian dari Demokrasi Terpimpin sebagaimana yang dimaksudkan Soekarno. Maka dalam hal ini, merujuk

⁷⁴ Soekarno, *Pidato Lahirnya.....op.cit* hlm. 44-45

pada pidato yang disampaikannya, tidak kurang dari 12 butir beliau kemukakan pengertian demokrasi terpimpin⁷⁵, yaitu:

- a. Demokrasi Terpimpin ialah demokrasi atau menurut istilah undang-undang dasar 1945 “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”.
 - b. Demokrasi Terpimpin bukanlah dictator, berlainan dengan Demokrasi Sentralisme dan berbeda pula dengan Demokrasi Liberal yang kita praktekan selama ini.
 - c. Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi yang cocok dengan kepribadian dan dasar hidup bangsa Indonesia.
 - d. Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi disegala soal kenegaraan dan kemasyarakatan yang meliputi bidang-bidang politik, ekonomi dan social.
 - e. Inti dari pada pimpinan dalam Demokrasi Terpimpin adalah permusyawaratan, tetapi suatu permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, bukan oleh perdebatan dan penyiasatan yang diakhiri dengan pengaduan kekuatan dan perhitungan suara pro dan kontra. Hasil permusyawaratan perwakilan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan itu kemudian diserahkan kepada seorang Presiden yang dipilih oleh permusyawaratan itu pula guna dilaksanakan. Dalam melaksanakan hasil permusyawaratan tersebut, Presiden menunjuk tenaga-tenaga yang baik dan cakap sebagai pembantu-pembantunya (menteri-menteri), tetapi Presiden secara individual (tidak secara kolektif bersama-sama pembantunya) bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Perwakilan Rakyat.
- Selanjutnya, dalam menjalankan aktivitas sehari-hari Haluan Negara (menurut garis-garis besar yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Presiden harus bekerja bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat, yang dilakukan pula dengan permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, tidak dengan mengutamakan perdebatan dan penyiasatan yang dapat mengakibatkan pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat atau penyerahan kembali mandat seluruh kabinet, hal-hal mana yang tidak dimungkinkan menurut Undang-Undang Dasar 1945.
- f. Oposisi dalam arti melahirkan pendapat yang sehat dan membangun diharuskan dalam alam Demokrasi Terpimpin, yang penting ialah cara bermusyawarah dalam permusyawaratan perwakilan juga harus dipimpin dengan hikmat kebijaksanaan.
 - g. Demokrasi Terpimpin adalah alat, bukan tujuan.

⁷⁵ Soekarno, *Demokrasi Terpimpin, Milik Rakyat Indonesia (Kumpulan Pidato Soekarno)*, dihimpun oleh Wawan Tunggul Alam, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2001, cet ke 2 hlm. 90-93

- h. Tujuan melaksanakan Demokrasi Terpimpin ialah mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur, yang penuh dengan kebahagiaan materil dan sprituil sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945.
- i. Sebagai alat, maka Demokrasi Terpimpin mengenal juga kebebasan berpikir dan berbicara, tetapi dalam batas-batas tertentu, yakni batas keselamatan Negara, batas kepentingan rakyat banyak, batas kepribadian bangsa, batas kesusilaan dan batas pertanggung jawaban kepada tuhan.
- j. Masyarakat adil dan makmur tidak bisa lain dari pada suatu masyarakat teratur dan makmur, yang terikat pada batas-batas tuntutan keadilan dan kemakmuran, yang mengenal ekonomi terpimpin dalam melaksanakan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka ekonomi terpimpin masih tersedia sektor-sektor perekonomian bagi pengusaha partikelir.
- k. Untuk menyelenggarakan masyarakat adil dan makmur, maka diperlukan suatu pola yang disiapkan oleh Dewan Perancang Nasional yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 80 Tahun 1958, dan untuk menyelenggarakan pola tersebut harus digunakan Demokrasi Terpimpin, sehingga dengan demikian Demokrasi Terpimpin pada hakikatnya adalah demokrasi penyelenggara atau demokrasi karya.
- l. Konsekwensi dari pada pelaksanaan Demokrasi Terpimpin adalah:
 - i. Penertiban dan pengaturan menurut wajarnya kehidupan kepartaian sebagai alat perjuangan dan pelaksana cita-cita bangsa Indonesia dalam suatu undang-undang kepartaian, yang ditujukan terutama kepada keselamatan Negara dan rakyat Indonesia sebagaimana diputuskan oleh musyawarah nasional pada bulan September tahun 1957, dengan demikian dapat dicegah pula adanya sistem multi partai yang pada hakikatnya mempunyai pengaruh tidak baik terhadap stabilitas politik di negara kita.
 - ii. Menyalurkan golongan-golongan fungsional yaitu kekuatan-kekuatan potensi nasional dalam masyarakat yang tumbuh dan bergerak secara dinamis, secara efektif dalam perwakilan guna kelancaran roda pemerintahan dan stabilitas politik.
 - iii. Keharusan adanya sistem yang lebih menjamin kontinuitas dari pemerintah yang sanggup bekerja melaksanakan programnya, yang sebagian besar dimuat dalam pola pembangunan semesta.⁷⁶

⁷⁶ Seluruh defenisi demokrasi terpimpin diatas disampaikan dalam pidatonya yang berjudul, *Demokrasi Terpimpin Dan Demokrasi Kita, Res Publica Sekali Lagi Res Publica*, yang disampaikan pada saat sidang Pleno Konstituante pada tanggal 22 April 1959 di Bandung

B. Masa Perkembangan Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

1. Awal Diterapkan Demokrasi Terpimpin

Yang menjadi ciri khas dari periode ini ialah dominasi yang kuat dari Presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh Komunis dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial-politik. Dalam mengemban tugasnya sebagai kepala pemerintahan, Presiden mempunyai kuasa penuh dalam membentuk/menyusun kabinet, kemudian melantik menteri-menteri yang ia susun untuk membantunya dalam mengurus urusan kenegaraan. Dan pada periode ini, Soekarno memberi nama kabinetnya dengan istilah *Kabinet Gotong Royong*.⁷⁷

Dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menjadi langkah awal mulai diterapkannya demokrasi terpimpin dengan sistem presidensill. Dalam pandangan Soekarno, ada beberapa ketetapan yang beliau jadikan sebagai pegangan dalam menjalankan demokrasi terpimpin yaitu:

- I. Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, yang mana Dekrit tersebut berisikan agar diberlakukannya kembali UUD 1945 dan dicabutnya UUDS 1950. Dan tanggal tersebut dianggap sebagai awal diberlakukannya Demokrasi Terpimpin dengan Sistem Presidensill. (*Dalam Hal Ini Penulis Lampirkan Naskah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dibawah ini*).
- II. TAP MPRS No. III/MPRS/1963 tentang pengangkatan Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dengan masa jabatan seumur hidup.⁷⁸

⁷⁷ Istilah gotong royong merupakan lambang dari penjabaran dari demokrasi terpimpin. Karena pada hakikatnya gotong royong menggambarkan rasa kebersamaan, kesetaraan dan kesatuan dalam bahu membahu menghadapi segala permasalahan. Kata gotong royong juga merupakan kata asli Indonesia yang menggambarkan jiwa Indonesia semurni-murninya

⁷⁸ Miriam Budiardjo, *op.cit* hlm. 71

III. TAP MPRS No. VIII/MPRS/1965 tentang Prinsip-Prinsip Musyawarah untuk mufakat dalam Demokrasi Terpimpin sebagai pedoman bagi Lembaga-Lembaga Permusyawaratan/Perwakilan.⁷⁹ Hal ini juga dapat dipandang sebagai suatu usaha untuk mencari jalan keluar dari kemacetan politik melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat.

Diterapkannya demokrasi terpimpin, membuka ruang bagi Soekarno untuk mewujudkan cita-cita luhurnya terhadap kemajuan bangsa Indonesia. Adapun cita-cita yang ingin dicapainya yaitu:

Pertama: Pembentukan satu Negara Republik Indonesia yang berbentuk Negara kesatuan dan Negara kebangsaan yang demokratis, dengan wilayah kekuasaan dari Sabang sampai Merauke.

Kedua: Pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur materil dan sprituil dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketiga: Pembentukan satu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dengan semua negara di dunia, terutama sekali dengan Negara-Negara Asia Afrika, atas dasar hormat-menghormati satu sama lain, dan atas dasar bekerja bersama membentuk satu dunia baru yang bersih dari imperialisme dan kolonialisme, menuju kepada perdamaian dunia yang sempurna.⁸⁰

2. Pedoman Dalam Penerapan Demokrasi Terpimpin.

Dalam menjalankan demokrasi terpimpin, Soekarno menjadikan sistem presidensill sebagai alat dalam menjalankan roda pemerintahan. Secara teoritis maupun praktis, demokrasi terpimpin menjadikan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai landasan serta pedoman dalam menjalankan roda pemerintahan. Karena hampir seluruh cita-cita yang

⁷⁹ Mahfud Md, *op.cit* hlm. 57

⁸⁰ Soekarno, *Demokrasi Tepimpin.....op.cit* hlm. 202, penjelasan diatas juga tertuang dalam *Amanat Penderitaan Rakyat*

ingin dicapai dalam Demokrasi Terpimpin sudah tertuang dalam batang tubuh (Pembukaan) UUD 1945⁸¹ dan Pancasila.⁸²

Menurut Soekarno: Undang-Undang Dasar 1945 adalah asli cerminan kepribadian Bangsa Indonesia, yang sejak zaman purbakalamula mendasarkan sistem pemerintahannya kepada musyawarah dan mufakat dengan pimpinan satu kekuasaan sentral ditangan seseorang sesepuh, seorang tetua yang tidak mendiktator tetapi memimpin, mengayomi. Demokrasi sejak zaman purbakala adalah Demokrasi Terpimpin dan ini adalah karakteristik bagi semua demokrasi-demokrasi asli di benua Asia.⁸³

Maka dalam hal ini, Soekarno menjadikan Demokrasi Terpimpin dengan sistem presidensill sebagai alat dalam mencapai tujuan dan cita-cita rakyat Indonesia. Tidak boleh lagi terjadi bahwa rakyat ditunggangi oleh pemimpin. Tidak boleh lagi terjadi bahwa rakyat menjadi alat demokrasi. Tetapi sebaliknya demokrasi harus menjadi alat rakyat. Demokrasi Terpimpin tidak menitik beratkan kepada satu orang sama dengan satu suara, sehingga partai menjadi semacam agen penjual suara. Tetapi dalam Demokrasi Terpimpin menitik beratkan kepada:

- a) Tiap-tiap orang diwajibkan untuk berbakti kepada kepentingan umum, berbakti kepada masyarakat, berbakti kepada nusa, bangsa dan Negara.

⁸¹ Untuk memperkuat penelitian ini, penulis lampirkan Naskah UUD 1945 pada lembaran lampiran

⁸² Adapun sila-sila yang dimaksudkan Soekarno ialah: (1) Kebangsaan Indonesia (Nasionalisme), (2) Internasionalisme atau Perikemanusiaan, (3) Mufakat atau Demokrasi (4) Kesejahteraan Sosial, (5) Ketuhanan Yang Maha Esa.

⁸³ Soekarno, *Demokrasi Terpimpin.....loc.cit* hlm. 184

- b) Tiap-tiap orang berhak mendapatkan penghidupan yang layak dalam masyarakat, Bangsa dan Negara.⁸⁴

3. Pro-kontra Demokrasi Terpimpin

Pada masa awal diterapkannya Demokrasi Terpimpin, Soekarno banyak menuai pro-kontra dari kalangan aparaturnya Negara ketika itu. Mereka menganggap Undang-Undang Dasar 1945 membuka kesempatan bagi seorang Presiden untuk bertahan sekurang-kurangnya selama 5 tahun. Akan tetapi ketetapan MPRS No. III/1963 yang mengangkat Soekarno sebagai Presiden seumur hidup telah membatalkan pembatasan lima tahun tersebut (Undang-Undang Dasar memungkinkan seorang Presiden untuk dipilih kembali). Selain itu banyak lagi tindakan yang menyimpang dari ketetapan Undang-Undang Dasar. Misalnya dalam tahun 1960 Soekarno sebagai Presiden membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat hasil dari pemilihan umum tahun 1955, padahal dalam Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit dijelaskan bahwa Presiden tidak mempunyai wewenang untuk berbuat demikian. Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong sebagai pengganti DPR yang lalu, ditonjolkan perannya sebagai pembantu pemerintah sedangkan fungsi kontrolnya ditiadakan.

Lagi pula pimpinan DPR dijadikan menteri dan dengan demikian, ditekankan fungsi mereka sebagai pembantu Presiden disamping fungsi sebagai wakil rakyat. Hal ini mencerminkan telah ditinggalkannya doktrin Trias Politica. Dalam rangka ini harus pula dilihat beberapa ketentuan lain

⁸⁴ *Ibid* hlm. 177

yang memberi wewenang kepada Presiden sebagai badan Eksekutif untuk campur tangan di bidang lain dari pada bidang Eksekutif. Misalnya Presiden diberi wewenang untuk campur tangan di bidang Yudikatif berdasarkan Undang-Undang No. 19/1964 dan di bidang Legislatif berdasarkan Peraturan Tata Tertib Peraturan Presiden No. 14/1960 dalam hal anggota DPR tidak mencapai mufakat.⁸⁵

Selain itu terjadi penyelewengan di bidang perundang-undangan dimana berbagai tindakan pemerintah dilaksanakan melalui Penetapan Presiden (PenPres) yang memakai Dekrit 5 Juli sebagai sumber hukum. Lagi pula didirikan badan-badan Ekstra Konstitusional seperti Front Nasional yang ternyata dipakai oleh pihak Komunis sebagai arena kegiatan, sesuai dengan taktik Komunisme Internasional yang menggariskan pembentukan Front Nasional sebagai persiapan kearah terbentuknya Demokrasi Rakyat. Partai politik dan Pers yang dianggap menyimpang dari rel revolusi tidak dibenarkan dan dibreidel, sedangkan politik menjadi kacau dibidang hubungan luar negeri dan ekonomi dalam negeri telah menyebabkan keadaan ekonomi dalam negeri menjadi tambah suram.⁸⁶

4. Perkembangan Hukum Dalam Demokrasi Terpimpin

Perkembangan tatanan hukum yang ada pada periode Demokrasi Terpimpin belum banyak berkembang seperti saat sekarang ini. Walaupun

⁸⁵ Miriam Budiardjo, *loc. cit* hlm. 69-70

⁸⁶ *Ibid* hlm. 71

demikian, bagi Soekarno hendaknya aturan/hukum yang berlaku saat itu bukan hukum “*Made In Belanda Atau Jepang*” akan tetapi hukum yang bisa memberikan keadilan dan kemakmuran kepada rakyat atau hukum pro rakyat.

Bagi Soekarno, hukum atau aturan-aturan yang mengatur kehidupan segenap rakyat Indonesia betul-betul hukum yang bisa mengayaumi seluruh tumpah darah Indonesia. Hukum yang berlaku di Indonesia bukanlah “*seperti mata pisau yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah*” yang pernah berlaku di masa penjajahan Belanda.

Penerapan hukum ketika itu lebih diarahkan terhadap nilai-nilai yang bersifat mutlak, artinya UUD 1945 menjadi tolak ukur dalam menjalankan hukum tersebut. Maka pemerintah cenderung untuk lebih berperan dalam mengelola Tiang *ekstraktif* dan *distributive*. Sejalan dengan aturan tersebut, timbullah keterlibatan pemerintah dalam bidang perekonomian yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak.⁸⁷

Keterlibatan pemerintah dalam mengendalikan sekaligus mengontrol keberlangsungan hidup rakyat Indonesia dalam segala bidang, merupakan salah satu cara Soekarno dalam upaya menciptakan demokrasi social dan demokrasi ekonomi.⁸⁸ Sebab, salah satu cara yang bisa dilakukan pemerintah dalam menumpas paham *Neo kapitalis* dan *Imperialis*

⁸⁷ Sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33 Ayat 1 dan 2 yang bersifat normatif

⁸⁸ Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi Jilid I*, Jakarta: Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, 1965, cet ke 4 hlm. 174

hanyalah dengan keikutsertaan pemerintah dalam mengendalikan dan mengontrol segala bidang tersebut.

C. Perkembangan Politik Dimasa Demokrasi Terpimpin

1. Penyaluran Tuntutan (Aspirasi Rakyat)

Pembubaran partai Masyumi dan PSI menjadi sejarah pahit bagi perkembangan partai politik di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kuantitas partai politik yang berperan sebagai tempat penyaluran tuntutan maupun aspirasi rakyat sudah berkurang. Pembubaran kedua partai tersebut berdasarkan Keputusan Presiden tanggal 17 Agustus 1960 No. 200 dan 201 Tahun 1960 dengan alasan bahwa: organisasi/partai tersebut melakukan pemberontakan, karena pemimpin-pemimpinnya turut serta dengan pemberontakan apa yang disebut dengan “Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI)” atau “Republik Persatuan Indonesia” telah jelas memberikan bantuan terhadap pemberontakan, sedangkan partai itu tidak resmi menyalahkan perbuatan anggota-anggota pimpinan tersebut.⁸⁹

Dalam sistem pemerintahan Demokrasi Terpimpin, yang menjadi penentu adalah Presiden Soekarno sebagai pimpinan eksekutif. Maka Anggota DPR dan MPR diangkat oleh Presiden Soekarno sendiri. Hal ini sesuai dengan Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945. Akan tetapi perkembangan ideologi masih tetap mewarnai periode ini, walaupun sudah

⁸⁹ Hak Cipta Sekretariat Negara Republic Indonesia, *op.cit* hlm. 166

dibatasi secara formal. Dalam periode ini pun masih berlanjut besarnya tuntutan/aspirasi yang melebihi kapasitas sistem. Setelah penyederhanaan kepartaian melalui PENPRES No. VII/1959 tentang syarat-syarat dan penyederhanaan kepartaian dan dibentuknya Front Nasional (FN), barulah diperoleh suatu stabilitas.⁹⁰ Kadar stabilitas ini dapat dinilai sebagai berwatak semu belaka, karena ternyata kemudian tidak meletakkan dasar yang kuat dalam proses pergantian pimpinan nasional. Titik berat stabilitas itu lebih mengandalkan adanya tokoh politik yang dapat mengelola FN tersebut.

Dengan adanya FN ketika itu seolah-olah berlaku sistem satu partai yang tidak kentara. Melalui sistem satu partai yang tidak kentara inilah suatu gaya yang berdasarkan orientasi terhadap nilai secara mutlak. Interpretasi pemerintahanlah yang selalu benar, tidak ada tawaran lain dan tidak dikenalnya alternative lain. Kekuasaan individu terhadap tokoh politik yang timbul setelah kurang lebih tahun 1963 menyebabkan penyaluran tuntutan menjadi terhambat, kecuali penyaluran tuntutan dari kelompok-kelompok yang dapat memberikan dukungan kepada elit politik yang berada dipemerintahan. Walaupun penyaluran aspirasi dibatasi, namu dalam pratek tuntutan tetap lebih besar dari pada kemampuan sistem.⁹¹

Dalam mekanisme sistem politik demokrasi terpimpin ini belum ditata suatu antisipasi seandainya tokoh politik tersebut tidak efektif dalam

⁹⁰ Rusadi Kartaprawira, *loc.cit* hlm. 193

⁹¹ *Ibid* hlm. 194

menjalankan roda pemerintahan akibat suatu hal. Tekanan saluran tuntutan yang tidak tertampung dalam kelembagaan, akhirnya Soekarno mencari keseimbangan melalui dukungan massa. Yang pada akhirnya menyebabkan berakhirnya stabilitas politik yang telah terwujud dan terbina selama periode tersebut.

2. Munculnya Gagasan Nasakom

Nasakom bukan ajaran Bung Karno, tapi adalah ide Soekarno untuk menyatukan seluruh kekuatan bangsa agar tak terpecah belah. Ide nasakom sebetulnya sudah lama ada di dalam benak Soekarno, yaitu ketika beliau masih di Partai Sarekat Islam (PSI). Pada saat itu PSI terpecah menjadi dua kekuatan, yaitu: PSI Merah menginginkan agar PSI juga ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, sedangkan PSI putih hanya ingin berdakwah saja. Pada saat itulah Soekarno dengan pidatonya yang memukau mulai meneriakkan ide Nasionalis-Islam-Marxis yang kemudian hari menjadi Nasionalis-Agama-Komunis. Ketika itu di Indonesia terdapat banyak partai yang *platformnya* terbagi dalam tiga kelompok, yaitu nasionalis, agamis, dan komunis. Misalnya, di Nasionalis ada PNI, Agamis ada Masyumi/NU dan Komunis ada PKI. Dan pada dasarnya ketiga faham ini tidak dapat disatukan, khususnya antara Agamis dan Komunis.⁹²

Bagi Soekarno, perubahan akan terjadi di dalam masyarakat apabila ketiga kekuatan politik tersebut dapat bersatu dalam satu konsep

⁹²<http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100310062105AATZRG>

yaitu “Nasakom”.⁹³ Tetapi, bangsa yang sedang membangun jati dirinya sangat memerlukan adanya persatuan dan kesatuan agar menjadi kuat dalam segala hal. Oleh karena itulah, Soekarno dengan kekuatan kharisma dan wibawanya menciptakan landasan Nasakom. Tapi dalam kenyataannya, upaya luhur Soekarno akhirnya membawa bencana dengan terjadinya peristiwa G-30-S PKI.

D. Masa Akhir Demokrasi Terpimpin (1966-1967)

1. Gerakan 30-September Partai Komunis Indonesia (G 30 S-PKI)

Pertentangan antara Presiden Soekarno, Tentara Angkatan Darat (TNI-AD) dan Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam konteks politik Demokrasi Terpimpin menjadi penting dalam kajian kekuatan-kekuatan politik dalam sistem politik demokrasi terpimpin. Hal ini merupakan suatu elaborasi masalah kekuatan-kekuatan politik dalam sebuah sistem pemerintahan. Persolan ini dibingkai ke dalam suatu konsep dasar, yaitu piramida kekuatan politik dalam sistem politik demokrasi terpimpin. Piramida kekuatan-kekuatan politik dalam sistem politik demokrasi terpimpin tersebut diwarnai oleh pertentangan politik antara Presiden Soekarno, tentara dan partai politik. Pertentangan ketiga kekuatan politik tersebut disebabkan karena perbedaan orientasi ideologis. Perbedaan-perbedaan itu juga akan mencerminkan kedudukan ideologis kelompok itu masing-masing.⁹⁴

⁹³ Alfian, *Pemikiran dan perubahan....op.cit* hlm. 115

⁹⁴ Soegiarso Soerojo, *Siapa Menabur Angin.....op.cit* hlm. 140

Perdebatan yang berkepanjangan antara ketiga kekuatan politik ini, akhirnya berdampak pada keamanan dan kestabilan roda pemerintahan. Dan puncak dari perseteruan tersebut terjadi tanggal 30 September 1965. Dengan adanya G30S-PKI membawa kekacauan disegala aspek kehidupan, baik bidang ekonomi, social apalagi dibidang politik.

Janji yang berulang kali diucapkan Presiden Soekarno untuk memberikan penyelesaian politik yang adil terhadap pemberontakan G30S-PKI belum juga diwujudkan. Sementara itu gelombang demonstrasi yang menuntut pembubaran PKI kian keras dan bertambah luas. Situasi yang menjurus kearah konflik politik tersebut bertambah lagi dengan munculnya rasa tidak puas terhadap keadaan ekonomi Negara.⁹⁵

Dalam keadaan serba tidak puas dan tidak sabar itu, akhirnya tercetuslah tiga tuntutan hati nurani rakyat. Dengan dipelopori oleh KAMI dan KAPPI⁹⁶, maka pada tanggal 12 Januari 1966 kesatuan-kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila memenuhi halaman DPR-GR dan mengajukan tiga tuntutan yang kemudian dikenal dengan sebutan “Tritura” yang isinya adalah:

1. Pembubaran PKI
2. Pembersihan Kabinet dari unsur G30S-PKI
3. Penurunan Harga/Perbaikan Ekonomi⁹⁷.

⁹⁵ Alfian, *op.cit* hlm. 12-113

⁹⁶ KAMI singkatan dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, KAPPI Kesatuan Aksi Pelajar dan Pemuda Indonesia

⁹⁷ Soegiarso Soerojo, *op.cit* hlm. 239

2. Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar)

Tragedi Supersemar adalah salah satu rentetan sejarah yang sampai saat ini menjadi sebuah misteri yang belum tersingkap. Karena sampai sekarang naskah asli supersemar pun belum bisa diketemukan. Banyak diantara sejarawan yang meragukan supersemar, namun banyak pula yang meyakini keberadaan supersemar. Perlu kita ketahui bahwa, Supersemar merupakan Surat Perintah pengamanan yang dikeluarkan Presiden Soekarno untuk ditujukan kepada Letnan Jendral Soeharto. Adapun maksud dari Surat Perintah Sebelas Maret tersebut yaitu:

*Memutuskan, memerintahkan kepada Letjen Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi. Atas nama Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi.*⁹⁸

Menurut Soekarno: maksud dari Supersemar adalah menjamin keamanan dan ketengan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi. Yang ditekankan adalah terjaminnya keamanan, ketenangan, kestabilan jalannya pemerintahan.⁹⁹

Untuk menjelaskan kesalah pahaman SP 11 Maret, maka dalam sebuah surat yang dikeluarkan Soekarno tanggal 13 Maret 1966, Soekarno menegaskan bahwa Supersemar adalah surat perintah, bukan penyerahan kekuasaan.

⁹⁸ Pernyataan tersebut pernah disampaikan waktu memberikan sambutan pada hari Raya Idul Adha di Mesjid Istiqlal pada 1 April 1966

⁹⁹ Tjipta Lesmana, *Dari Soekarno Sampai SBY, Intrik Dan Lobi Politik Para Penguasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009, hlm. 21

Berdasarkan wewenang yang bersumber pada SP 11 Maret, Letnan Jendral Soeharto atas nama Presiden menetapkan pembubaran dan pelarangan Partai Komunis Indonesia (PKI) termasuk semua bagian-bagian organisasinya yang seapas/berlindung/bernaung dibawah keputusan tersebut dituangkan dalam Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Mandataris MPRS/Pimpinan Besar Revolusi No. 1/3/1966. Maka pada tanggal 12 maret 1966 tindakan pertama Letnan Jendral Soeharto sebagai pengemban SP 11 maret 1966.¹⁰⁰

Keputusan pembubaran dan pelarangan PKI itu diambil oleh pengemban supersemar berdasarkan pertimbangan bahwa pki telah nyata-nyata melakukan perbuatan kejahatan dan kekejaman. Bukan itu saja, tetapi telah dua kali melakukan penghianatan terhadap Negara dan rakyat Indonesia yang sedang berjuang. Seluruh rakyat Indonesia yang menjunjung tinggi landasan falsafah dan ideology pancasila waktu itu serentak menuntut dibubarkannya PKI. Karenanya, keputusan pembubaran PKI itu telah disambut dengan gegap gempita dan perasaan lega oleh seluruh rakyat Indonesia.¹⁰¹ Bersilag enam hari diterimanya supesemar, maka Letnan Jendral Soeharto berhasil membubarkan PKI dan menangkap 15 orang Pengurus Tertinggi PKI.

Pada tanggal 25 Juli 1966 MPRS menyelenggarakan sidang umum, yang mana agenda terpenting yang dibicarakan adalah pengukuhan Surat

¹⁰⁰ Soegiarso Soerojo, *op.cit* hlm. 188

¹⁰¹ *Ibid* hlm. 189

Perintah 11 Maret 1966 oleh MPRS, dengan demikian Presiden Soekarno dengan alasan apapun tidak dapat menarik kembali surat perintah tersebut. Puncak dari pemeretelan kekuasaan Presiden Soekarno terjadi ketika Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) menggelar Sidang Istimewa pada tanggal 1-12 maret 1967. Hasil utama SI MPRS 1967 adalah TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno. Pasal 3 TAP MPRS dengan tegas menetapkan “Menarik kembali Mandat MPRS dari Presiden Soekarno serta segala kekuasaan pemerintahan Negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya dalam pasal 4 TAP MPRS yang sama, “ mengangkat Letnan Jendral Soeharto pengemban ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1967 sebagai pejabat Presiden berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 hingga dipilihnya Presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilihan umum.¹⁰²

Maka dengan keluarnya ketetapan MPRS tahun 1967 tersebut diatas, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan awal bahwa kedudukan kepala pemerintahan (Presiden) pada saat itu sudah berpindah tangan dari Soekarno ke tangan Soeharto. Dan ini menjadi perjalanan akhir dari demokrasi terpimpin ala Soekarno.

¹⁰² Tjipta Lesmana, *op.cit* hlm. 25

BAB IV

ANALISIS DATA

Dalam bab ini ada beberapa pembahasan pokok yang menjadi fokus analisa penulis terkait dengan Demokrasi Terpimpin, yaitu:

1. Kedudukan Islam Di Era Demokrasi Terpimpin.

Dalam konteks realisasinya, terjadi tarik menarik antara pemeluk agama Islam dan Negara senantiasa diwarnai oleh motivasi politik. Oleh karena itu, rezim kekuasaan tampaknya memiliki peran yang lebih dominan untuk memainkannya. Ini bisa dimaklumi karena kekuasaan punya kekuatan dan alat untuk berbuat kekerasan. Dengan kondisi demikian, rezim kekuasaan seringkali bertindak pragmatis. Demi mempertahankan kekuasaannya, maka rezim kekuasaan melakukan cara apa saja, kadang merangkul, tapi kadang juga memberangus Islam. Fenomena itu kemudian melahirkan ide sekularisasi, dimana agama khususnya Islam dipisahkan dari Negara.

Untuk menetralsir ide-ide sekularisasi, Soekarno mencoba merangkul komunitas agama khususnya Islam lewat ideologi Nasakom. Ia mencoba menyatukan tiga unsur penting: Nasionalis, Agama, Komunis. Rezim kekuasaan sering kali alergi terhadap Islam politik dan Islam ideologi yang kadang kala sangat obsesif menegakkan tatanan hidup berdasarkan syari'at Islam, hukum Islam dan puncaknya mendirikan Negara Islam. Beberapa diantaranya bahkan melakukan pemberontakan radikal bersenjata, ingin memisahkan diri dari NKRI

dan mendirikan Negara Islam. Benih-benih Islam ideologi bahkan muncul sebelum dan pada pemerintahan Soekarno, kemudian berlanjut dimasa pemerintahan Soeharto. Di era reformasi pun benih-benih Islam politik dan Islam ideologi tetap ada dan mungkin sampai kapan pun akan selalu ada.

Dalam konteks Indonesia, Pancasila yang dirumuskan Soekarno merupakan perpaduan yang unik antara ide-ide Nasionalisme, Islamisme, Komunisme, Demokrasi Parlementer dan ide-ide kerakyatan Indonesia. Dalam pandangan Soekarno, perpaduan berbagai ide tersebut diharapkan bisa memuaskan kalangan nasionalis sekuler dan nasionalis Islam.

Sikap religius dan nafas budaya memang kelihatan mencolok dalam pemikiran Soekarno. Ada elemen-elemen keagamaan yang menjadi dasar dalam berbagai aktifitas Soekarno. Suatu keyakinan bahwa perjuangannya terhadap kemerdekaan bangsanya dan penegakan demokrasi merupakan tugas suci. Religiusitas dan nasionalisme bersemayam secara inhern dalam diri Soekarno.

Dalam bidang ideologi, Soekarno lebih sering disebut dengan manusia sintesis, karena ia merupakan personifikasi dari tiga aliran ideologi yang berkembang di Indonesia yaitu: Nasionalisme, Islamisme dan Kominisme. Maka dalam bidang keislaman oleh Clifford geertz, ia dianggap sebagai personifikasi yang dapat mewakili corak beragama bangsa Indonesia.¹⁰³ Memang hal itu tidak bisa dilepaskan dari pengaruh agama dan orang tuanya. Keberagaman orang tuanya banyak mempengaruhi Soekarno. Hal ini pada akhirnya berpengaruh

¹⁰³ Clifford Geertz, *Islam Yang Saya Amati: Perkembangan Di Maroko Dan Di Indonesia*, Jakarta : YIIS, 1982, hlm. 59

terhadap pandangannya atas dasar Negara Indonesia. Walaupun ketuhanan merupakan dasar Negara, namun tampaknya ketuhanan yang dimaksudkan Soekarno bukanlah ketuhanan dalam konsep Islam. Ia hanya menganjurkan agar seluruh warga Negara Indonesia berketuhanan, dan seluruh warga Negara bebas menjalankan agamanya masing-masing, serta saling menghormati satu sama lain. Tidak ada egoisme agama dalam negara Indonesia dan dengan demikian agama pada dasarnya dipisahkan dari Negara, sebagaimana halnya di Turki. Agama menjadi milik pribadi, sedangkan Negara milik semua. Soekarno mengatakan: *semua buat semua*, bukan Kristen buat Indonesia, bukan golongan Islam buat golongan Indonesia, bukan Hadikusumo buat Indonesia, tetapi Indonesia buat Indonesia.¹⁰⁴

Tampaknya ia tetap bertahan pada konsepnya tentang demokrasi dan agama yang mengatakan bahwa bila bersifat demokratis, berarti Negara dan agama harus dipisahkan dan sebaliknya bila keduanya disatukan demokrasi akan tersingkir dari kehidupan bernegara. Namun sebagaimana ia ungkapkan juga dalam pembicaraannya tentang Negara Islam, ia juga mengatakan bahwa kemungkinan untuk menciptakan masyarakat, Islam tetap terbuka. Kebijakan Negara yang sesuai dengan jiwa Islam dapat direalisasikan apabila kursi-kursi Parlemen dikuasai oleh mayoritas umat Islam yang benar-benar memiliki jiwa Islam.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Soekarno, *Pidato Lahirnya Pancasila...op.cit* hlm. 41

¹⁰⁵ *Ibid* hlm. 41-42

Demokrasi yang diinginkan Soekarno adalah demokrasi yang sesungguhnya yaitu demokrasi yang dipimpin sekaligus terbimbing dan berdasarkan sepenuhnya pada kedaulatan rakyat. Dalam beberapa pidatonya, sudah terlihat ketidaksukaan Soekarno akan sistem Demokrasi Parleментар/Liberal. Soekarno lebih suka pada demokrasi rakyat yang tidak didasarkan pada perbedaan-perbedaan kelas dalam masyarakat. Sejak sebelum kemerdekaan, Soekarno mencanangkan perlunya suatu demokrasi yang sesuai dengan kondisi rakyat Indonesia, yaitu suatu demokrasi yang bukan hanya bersifat politik, tapi juga bersifat ekonomi atau yang sering disebut soekarno dengan istilah *Sosio Demokrasi*.¹⁰⁶

Disamping itu, jiwa Nasionalisme yang disikapinya tidak bertentangan dengan agama yang dipeluknya. Buktinya ia seorang muslim sejati yang taat sekaligus berpaham kebangsaan (sekuler). Segenap sikap, tindakan dan perbuatannya menjadi tolak ukur pada agama yang diyakininya. Ia tampak konsisten pada agama yang dipeluknya. Bagi Soekarno, Islam dalam ajaran kemasyarakatan lebih mementingkan tegaknya keadilan, persamaan dan kebenaran. Ini harus mengejawantah dan memberi isi pada Negara Pancasila yang didirikan. Dengan demikian, meski ia tidak bergerak atas nama Islam tapi dalam persoalan agama ia tetap taat.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi Vol I*, Jakarta : Panitia Penerbit *Dibawah Bendera Revolusi*, 1963, hlm. 174

¹⁰⁷ Pengidentifikasian kepada golongan sekuler dan golongan Nasionalis Islam, antara lain mencuat dalam karya Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22Juni 1945 dan sejarah konsensus nasional antara Nasional Islam dan Nasional Sekuler tentang dasar Negara Republik Indonesia 1945-1959*, Jakarta : Rajawali Pers, 1986. Sebagian Kriteria yang mengemuka dalam pengklasifikasian para tokoh politik di Indonesia menjadi Nasioanalis Islam dan Nasionalis

Dalam uraian di atas, terlihat jelas bahwa di masa depan, Islam bisa punya kontribusi penting terhadap demokrasi, bisa juga tidak. Hal sangat tergantung pada bagaimana Islam diekspresikan oleh pemeluknya. Warna Islam sedemikian banyak dan beragam, sehingga persentuhan Islam dengan demokrasi, politik, Negara, pemerintahan dan masyarakat di luar Islam pun bisa sangat banyak ragamnya. Maka yang penting bukan faktor Islamnya itu sendiri, melainkan ekspresi umat Islam dalam dunia yang riil.

Demokrasi dalam perjalanan sejarah berasal dari Barat yang konotasi negative. Tapi Soekarno punya argumen yang cukup baik untuk menepis prasangka itu. Dalam dua titik ekstrem sikap terhadap demokrasi, baik yang menerima secara utuh maupun menolaknya, maka biasanya muncul jalan tengah yakni sikap kritis untuk belajar dari nilai-nilai demokrasi yang berasal dari Barat dengan segala kekurangan dan kelebihanannya. Yang bisa dikontekstualisasikan dalam budaya lokal pun bisa dipakai, sementara yang tidak bisa dikontekstualisasikan dengan budaya lokal sebaiknya ditinggalkan. Soekarno sendiri punya keyakinan bahwa jika dikontekstualisasikan dengan tepat, wacana demokrasi bukanlah konstruksi ikatan budaya yang hanya relevan dengan konteks masyarakat Barat.

Sekuler adalah bertolak dari ciri partai tempat tokoh tersebut aktif dan berjuang dalam pergerakan kemerdekaan. Dalam sejarahnya, Soekarno mendirikan dan aktif dalam PNI, tetapi meski demikian sikap religius dan nafas budayanya tetap mencuat dalam berbagai pemikiran yang dikembangkannya. Lihat: Isbodroini Suyanto, *Soekarno Dan Nasionalisme, Dalam Soekarno : Pemikiran Politik Dan Kenyataan Praktek*, Nazaruddin Syamsuddin (ed), Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada, 1993, hlm. 38

Kunci sebenarnya ke arah daya tarik lintas kultural demokrasi bukanlah peniruan Barat atau Westernisasi, melainkan dialog dan kontekstualisasi. Jadi dialog lintas kultural adalah titik masuk yang lebih baik untuk memakai demokrasi modern dari pada pendekatan filosofis sempit yang membekukan gagasan-gagasan masa lalu Barat yang negatif. Dalam konteks ini, Soekarno memutuskan untuk melampaui batas-batas akademisnya. Penerimaan gagasan demokrasi di luar Barat tidak menjanjikan kebenaran, tetapi lebih memperkaya. Sejarah tidak pernah berakhir, tidak ada kemenangan idealitas demokrasi yang defenitif. Zaman ini akan tetap menjadi zaman percobaan demokrasi dan apakah lebih baik atau lebih buruk, putusan sejarah akan beragam.

2. Berlakunya Kembali UUD 1945

Dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menjadi langkah awal Soekarno dalam menerapkan sistem Demokrasi Terpimpin dan memberlakukan kembali UUD 1945 yang hampir 14 tahun terkudeta oleh sistem Demokrasi Parlementer. Kebijakan atas peralihan sistem ketatanegaraan yang dilakukan Soekarno merupakan salah satu solusi dalam mengatasi kemelut politik yang melanda bangsa Indonesia.

Ketidak mampuan sistem Demokrasi Parlementer dalam menjaga kestabilan urusan pemerintahan, akhirnya berdampak pada tatanan kehidupan yang semakin hari semakin memburuk. Kedudukan dan kekuasaan menjadi ajang perebutan di kalangan elit politik dan kadang kala melalaikan nilai-nilai luhur yang tertuang dalam UUD 1945 dan Pancasila.

Dalam pandangan penulis, ada beberapa cita-cita yang ingin dicapai Soekarno sesuai dengan isi yang tertuang dalam UUD 1945 dan Pancasila, yaitu:

1. Pembentukan satu Negara Republik Indonesia yang berbentuk Negara kesatuan dan bangsa yang demokratis, dengan wilayah kekuasaan dari Sabang sampai Merauke.
2. Menciptakan masyarakat yang makmur dan adil, baik materil maupun sprituil yang berada dalam naungan NKRI
3. Menjalin satu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dengan semua Negara di dunia terutama sekali dengan negara-negara yang ada di kawasan Asia-Afrika atas dasar hormat menghormati satu sama lain. Atas dasar bekerja bersama membentuk satu dunia baru yang bersih dari imperialisme dan kolonialisme menuju satu peradaban dunia yang penuh kedamaian dan kesempurnaan.
4. Membentuk suatu sistem pemerintahan yang bisa melindungi dan mengayauami, memimpin sekaligus membimbing serta menjadi tumpuan bagi rakyat dalam jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka dalam hal ini pemerintah berperan penting dalam pengontrol atas terlaksananya sistem tersebut.

Melihat hal diatas, sangat wajar kiranya UUD 1945 dijadikan landasan pokok dalam proses jalannya sistem pemerintahan, karena dalam pandangan penulis UUD 1945 merupakan cerminan karakteristik yang menjiwai seluruh cita-cita bangsa Indonesia.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Aktualisasi demokrasi harus dilakukan melalui upaya-upaya bersama (golongan, etnis, agama, dan suku bangsa) yang berorientasi pada terciptanya masyarakat Indonesia yang demokratis, toleran dan kompetitif. Tuntutan gelombang demokrasi menuju masyarakat yang terbuka dan toleran merupakan peluang bagi bangsa Indonesia untuk ambil bagian dalam pembangunan peradaban dunia yang lebih terbuka dan manusiawi. Keterlibatan ini dapat dilakukan melalui cara-cara pengembangan budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja hal ini tidak mudah, karena demokrasi pada dasarnya butuh kerelaan untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang tidak demokratis. Tumbuhnya budaya demokrasi juga butuh dukungan unsur lain, yakni Negara. Negara harus memfasilitasi perangkat-perangkat masyarakat untuk berlangsungnya demokrasi.

Terdapat argumen yang bisa menjelaskan mengapa pertumbuhan dan perkembangan demokrasi di Indonesia begitu lamban, *pertama*, adanya pemahaman doktrinal sebagian masyarakat Islam Indonesia yang menghambat demokrasi, karena gagasan tersebut bisa dikatakan cukup asing dalam *mind-set* Islam. Hal ini disebabkan karena kebanyakan kaum muslimin Indonesia masih cenderung memahami demokrasi sebagai sesuatu yang bertentangan dengan Islam, karena demokrasi adalah produk Barat sedangkan Indonesia adalah orang

Timur yang mempunyai budaya dan peradaban yang berbeda terutama dalam hal agama. *Kedua*, persoalan kultur, perlu disadari bahwa warisan kultur masyarakat Muslim Indonesia sudah terbiasa dengan nilai-nilai yang bersifat otokrasi dan ketaatan absolut kepada pemimpin, baik pemimpin agama maupun pemimpin negara.

Akan tetapi, apabila masyarakat Muslim Indonesia mempunyai paradigma tentang demokrasi berbasis Islam, maka nilai-nilai Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam akan terwujud dengan sendirinya. Karena Islam dalam dirinya demokratis, dalam arti tidak hanya prinsip syura (musyawarah), akan tetapi juga karena adanya konsep ijtihad (consensus). Dengan demikian pada tahun-tahun mendatang Indonesia akan menjadi sebuah Negara pertama yang menganut sistem demokrasi berbasis Islam terbesar di dunia.

2. Saran

- a. Perkembangan pemikiran telah melahirkan begitu banyaknya sistem kenegaraan yang mendunia, walaupun demikian bangsa Indonesia harus mampu memilih satu diantaranya yang banyak itu. Sistem tersebut hendaklah bisa menjadi cerminan dari karakter bangsa ini.
- b. Demokrasi merupakan pilihan hidup. Maka pilihlah satu demokrasi yang membuat hidup terasa hidup.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari begitu banyaknya kesalahan dan kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini. Maka dengan hati yang lapang penulis mengharapkan kritik dan sarannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Cindy, *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*, Jakarta: Gunung Agung, 1985
- Alam, Tunggul, Wawan, *Demi Bangsaaku, Pertentangan Sukarno Vs Hatta*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003
- Alfian, *Pemikiran Dan Perubahan Politik Indonesia, kumpulan karangan* Jakarta : Pt. Gramedia, 1978
- Anwar, Rosihan, *Sukarno, Tentara, PKI, Segitiga Kekusaan Sebelum Prahara Politik 1961-1965*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2006
- Bagus, Lorens, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, cet ke 2, 2000
- Bisri, Hasan, Cik dan Rufaidah, Eva, *Model Penelitian Agama Dan Dinamika Social*, Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada, 2002
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998
- Buku Panduan Akademik Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun Akademik 2010/2011
- Cahyono, Hari, Cheppy, dan Alhakim, Suparlan, *Ensiklopedi Politika*, Surabaya: Usaha Nasional, 1982
- Fananie, Bey, Husnan, *Membaca Kembali Pemikiran Soekarno Tentang Islam Dan Demokrasi*, Jurnal Himpunan Peminat Ilmu Ushuluddin, Vol 1 No.1 2010/1432

- Geertz, Clifford, *Islam Yang Saya Amati: Perkembangan Di Maroko Dan Di Indonesia*, Jakarta : YIIS, 1982
- Gibels, Lambert, *Soekarno Biografi 1901-1950*, Jakarta : Garsindo, cet ke 2, 2001
- Hak Cipta Secretariat Negara Republic Indonesia, *30 Tahun Indonesia Merdeka*, Jakarta: Pt. Citra Lamtoro Gung Persada, 1977
- Halim , Andrea, *Kamus Lengkap 10 Milyar Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, Surabaya : Sulita Jaya, tanpa tahun
- Hilmy, Masdar, *Islam dan Tantangan Demokratisasi di Indonesia*, Jurnal Dialog Peradaban, Volume 1, No 2, Januari-Juni 2009
- Ihsan A.Bakir, *Etika Dan Logika Berpolitik, Wacana Kritis Atas Etika Politik, Kekuasaan Dan Demokrasi*, Bandung : Pt. Remaja Rosda Karya, 2009
- Jurdi, Syarifuddin ,*Pemikiran Politik Islam Indonesia, Pertautan Negara, Khilafah, Masyarkat Madani Dan Demokrasi*, Yogjakarta Pustaka Pelajar, cet ke 1, 2008
- Kartaprawira, Rusadi, *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar*, Bandung: Sinar Baru, 1977
- Lesmana, Tjipta, *Dari Soekarno Sampai SBY, Intrik Dan Lobi Politik Para Penguasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 2009
- Lubis, Ridwan, Muhammad, *Pemikiran Soekarno Tentang Islam*, Jakarta: Haji Masagung, cet ke 1, 1992

- Lucky, Nella, *Tela'ah Kritis Taqiyuddin An-Nabhani Terhadap Demokrasi*, Skripsi Program Sarjana Strata 1 Jurusan Aqidah Filsafat Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA Riau, 2010
- Mahfud, MD, *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia, Studi Tentang Interaksi Politik Dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Jakarta : Rineka Cipta, cet ke 2, 2003.
- Moleong,J,Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Pt. Remaja Rosdakarya, cet ke 20 Edisi Revisi, 2004
- Poerwadarminta,W,J,S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1982
- Rozak, Abdul & Ubaedillah, Abu dkk, *Demokrasi, Hak Azazi Manusia Dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE Uin Syahid, cet ke 1, 2006
- Rahardjo, Toto ,Iman. & WK, Herdianto, *Bung Karno Dan Tata Dunia Baru, Mengenang 100 Tahun Bung Karno*, Jakarta : Grasindo, 2001
- _____, *Bung Karno ,Wacana Konstitusi Dan Demokrasi*, Jakarta : Grasindo, 2001
- _____, *Bung Karno Dan Partai Politik, Kenangan 100 Tahun Bung Karno*, Jakarta : Grafindo, 2001
- Salam, Solihin, *Bung Karno Putra Fajar*, Jakarta: Gunung Agung, cet ke 4 , 1984
- Sartono, Dkk, *Sejarah Nasional Dan Umum*, Surakarta : Pt. Pabelan, 2006

Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi, Jilid I*, Jakarta : Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, 1965

_____, *Pidato Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945*, Simpatisan Pembela Pancasila, cet ke 2, Agustus, 2008

_____, *Demokrasi Terpimpin, Milik Rakyat Indonesia (Kumpulan Pidato Soekarno)*, dihimpun oleh Wawan Tunggul Alam, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, cet ke 2, 2001

Soerojo, Soegiarso, *Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai, G30S-PKI dan Peran Bung Karno*, Jakarta : Pt. Intermasa, 1988

Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada, 2002

<http://www.scribd.com/doc/20796228/BIOGRAFI-SOEKARNO>

<http://kolom-biografi.blogspot.com/2009/01/biografi-presiden-soekarno.html>

<http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100310062105AATZRGr>